



LAPORAN TAHUNAN 2017

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat

<http://balitbanghub.dephub.go.id/>

LAPORAN TAHUNAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2017



**Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Kementerian Perhubungan**



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat tersusun buku Laporan Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tahun anggaran 2017.

Buku laporan tahunan yang berisikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2017 serta program kegiatan tahun 2018 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas serta sebagai pedoman untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pada masa yang akan datang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diuraikan berdasarkan unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Informasi-informasi yang diberikan dalam laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan dapat bermanfaat bagi publik dan khalayak yang berkepentingan di bidang transportasi, hal ini sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap masyarakat.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kita masing-masing di masa mendatang secara lebih berdaya dan berhasil guna.



Jakarta, Maret 2018

Kepala Badan Litbang Perhubungan,

Ir. Umiyatun Hayati Triastuti,
M.Sc.

PROFIL BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

Sejarah

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Juncto Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979. Sebagai pelaksana Keputusan Presiden di atas, Organisasi dan Tata Kerja Badan ini disempurnakan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80, dan selanjutnya disetujui Menteri Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-299/1/MENPAN/4/80 tanggal 22 April 1980.

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan adalah pelaksana tugas penelitian dan pengembangan (litbang) dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.

VISI

“ Terwujudnya Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai pusat pengetahuan untuk penelitian, pengembangan, dan teknologi transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah”

MISI

- Melakukan penelitian, pengembangan dan teknologi (litbangtek) bagi perumusan kebijakan strategis transportasi.
- Melakukan kerja sama dengan lembaga IPTEK.
- Melakukan pelayanan penelitian, pengembangan dan teknologi transportasi.
- Penguatan *database transport*.
- Mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan teknologi di bidang transportasi.
- Penguatan sarana prasarana, SDM, kelembagaan penelitian, pengembangan dan teknologi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan pokok penelitian Badan Litbang Perhubungan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara berupa penelitian/studi dan telaahan/ kajian yang sifatnya lintas sektoral, transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan serta udara. Pada Tahun Anggaran 2017, Badan Litbang Perhubungan telah menyelesaikan 145 studi yang terdiri dari 18 studi besar, 5 studi sedang, dan 122 studi kecil.

Terdapat beberapa penelitian di Badan Litbang yang menjadi penelitian strategis seperti: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Uji Simulasi *Crashworthiness* Pada Desain Rancang Bangun Karoseri Kendaraan Angkutan Penumpang di Indonesia, Studi Optimalisasi Program Tol Laut, dan Studi Pemilihan Tipe Pesawat Udara dan Pembuatan *Hub and Spoke* (Pengumpul dan Pengumpan) Bandar Udara untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik di Papua.

Badan Litbang Perhubungan menyelenggarakan kegiatan penunjang lainnya seperti:

1. Lomba Penelitian

Lomba Penelitian Transportasi Tingkat Nasional Tahun 2017, kegiatan yang bertema “Melalui Inovasi Kita Ciptakan Perkeretaapian Nasional Yang Andal, Selamat, Efisien dan Nyaman” ini untuk menampung dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan transportasi. Diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di sektor transportasi. Pemenang Peringkat I Tingkat Nasional mendapatkan penghargaan Cipta Tata Wahana Nusantara Award dari Menteri Perhubungan. Selain itu bersama dengan peringkat II dan III Nasional telah mengikuti *Transport Education Trip* pada tanggal 25 s.d. 30 November 2017 ke Beijing.

2. Kegiatan Seminar/ *Workshop/ Focus Group Discussion (FGD)* bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pokok Badan Litbang Perhubungan dan dalam rangka *transfer of knowledge* bagi para peneliti. Pada tahun 2017, Badan Litbang telah melaksanakan kegiatan Seminar/ *Workshop/ Focus Group Discussion (FGD)* sebanyak 35 kali.

3. Temu Karya Peneliti, kegiatan ini merupakan ajang untuk mengembangkan kreativitas para peneliti dan saling tukar menukar informasi serta sebagai forum peneliti untuk latihan mengembangkan potensi diri dan mempublikasikan karya ilmiahnya. Pada tahun anggaran 2017, Badan Litbang telah melaksanakan temu karya peneliti pada tanggal 6 September 2017. Keempat pusat penelitian transportasi di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan turut berpartisipasi dalam Temu Karya Peneliti. Pembahasnya yaitu para peneliti senior Badan Litbang Perhubungan bekerjasama dengan para peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

4. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penelitian dan Pengembangan Transportasi Tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 18 Februari 2017 di Jakarta, dengan tema “Peningkatan Sinkronisasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi dalam Mewujudkan Konektivitas Transportasi Nasional yang Efektif dan Efisien”.
5. Kegiatan Forum Komunikasi Kelitbang (FKK) bertujuan untuk mewujudkan sinergitas penelitian dan pengembangan dalam mendukung kualitas berbagai prioritas nasional melalui inovasi dan kolaborasi penelitian antar lembaga kelitbang dan stakeholder. Diselenggarakan pada tanggal 21 November 2017 di Hotel *Grand Mercure* Harmoni dengan tema “Penguatan Kapasitas dan Peran Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Inovasi Pembangunan Infrastruktur Guna Peningkatan Daya Saing Perekonomian Nasional”
6. Pengembangan Kompetensi SDM Badan Litbang Perhubungan
Kegiatan pengembangan kompetensi SDM Badan Litbang Perhubungan dilaksanakan melalui diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Perhubungan dan lembaga penyelenggara diklat non kementerian.
7. Serah Terima Hasil Penelitian
Serah terima hasil penelitian ditandai dengan adanya penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan penyerahan studi dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.
8. Penerbitan/ Publikasi
Jumlah makalah yang dipublikasikan pada warta penelitian dan jurnal penelitian yaitu sebanyak 78 makalah dengan komposisi publikasi yaitu 31% pada Warta Penelitian, 26% pada Jurnal Penelitian Transportasi Darat, 15% pada Jurnal Transportasi Multimoda, 15% pada Warta Ardhia (Jurnal Udara), dan 13% pada Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Selain publikasi yang ada di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, peneliti Badan Litbang juga telah mempublikasikan tulisannya di jurnal-jurnal internasional pada Tahun 2017, yaitu:
 - a. Siti Maimunah (Peneliti Madya Transportasi Darat dan Kereta Api), *Spatial Econometric Analysis of Automobile and Motorcycle Traffic on Indonesian National Roads and Its Socio-Economic Determinants: Is It Local or Beyond City Boundaries?*;
 - b. Reslyana Dwitasari (Peneliti Muda Transportasi Antarmoda), *Analyzing Commuters Behavior on Egress Trip From Railway Station in Yogyakarta, Indonesia*.Publikasi penelitian juga dilakukan melalui penyusunan buku *Knowledge Sharing Program (KSP)* yang bertujuan untuk memasyarakatkan hasil penelitian, sebanyak 11 buku *KSP* telah disusun pada Tahun 2017. Dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi hasil penelitian, pada Tahun 2017 Badan Litbang Perhubungan telah mengajukan sebanyak 10 (sepuluh) penelitian kepada Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh Hak Cipta.

Daftar Isi



hal
6

Bab 1. Pendahuluan

Gambaran Umum; Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;
Komposisi Pegawai

hal
15

Bab 2. Kegiatan Penelitian Transportasi

Transportasi Antarmoda; Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
Transportasi Laut dan SDP; Transportasi Udara

hal
39

Bab 3. Kegiatan Penunjang

Peningkatan Kompetensi; Seminar/ *FGD*/ *Workshop*; Publikasi Penelitian

hal
58

Bab 4. Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis dan Lainnya

Bidang Perencanaan; Bidang Kepegawaian dan Organisasi; Bidang
Keuangan dan Perlengkapan; Bidang Hukum; Bidang Kerja Sama;
Perpustakaan

hal
68

Bab 5. Kegiatan Lainnya

Lomba Penelitian; Temu Karya; Rakornis, Forum Komunikasi Kelitbangan

hal
80

Bab 6. Penutup

Tinjauan Umum; Tinjauan Khusus

BAB I

PENDAHULUAN



GAMBARAN UMUM

Badan Litbang Perhubungan memiliki peran penting sebagai unit kerja penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi. Pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan diarahkan dalam rangka mewujudkan pelayanan jasa transportasi, yaitu melalui: (1) penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan transportasi; (2) pelaksanaan penelitian kolaborasi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait; dan (3) pengembangan teknologi dan rekayasa di bidang transportasi.

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2019** telah ditetapkan program Badan Litbang Perhubungan adalah Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan. Pencapaian program diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan dan kegiatan dukungan teknis dan manajemen teknis lainnya. Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi bidang transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai,

danau dan penyeberangan dan transportasi udara.

Seluruh penelitian yang dilaksanakan sejak perencanaan hingga produk akhir diorientasikan pada kebutuhan *stakeholder/user*. Pemanfaatan hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan dapat bersifat ke dalam (internal Kementerian Perhubungan) dan institusi di luar Kementerian Perhubungan atau masyarakat (eksternal). Sebagai institusi penunjang di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka pelayanan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi prioritas kegiatan Badan Litbang Perhubungan. Para penerima manfaat hasil penelitian dan pengembangan Badan Litbang Perhubungan apabila dikelompokkan terdiri dari:

1. **Unit kerja operasional di lingkungan Kementerian Perhubungan** seperti Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Badan, KNKT dan seluruh satker di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. **Masyarakat** yang memanfaatkan hasil litbang, yaitu Pemerintah Daerah beserta jajarannya, kalangan akademisi, operator transportasi, institusi terkait, masyarakat profesional; dan
3. **Peneliti** itu sendiri untuk peningkatan kompetensi dirinya dan pengembangan penelitian transportasi.

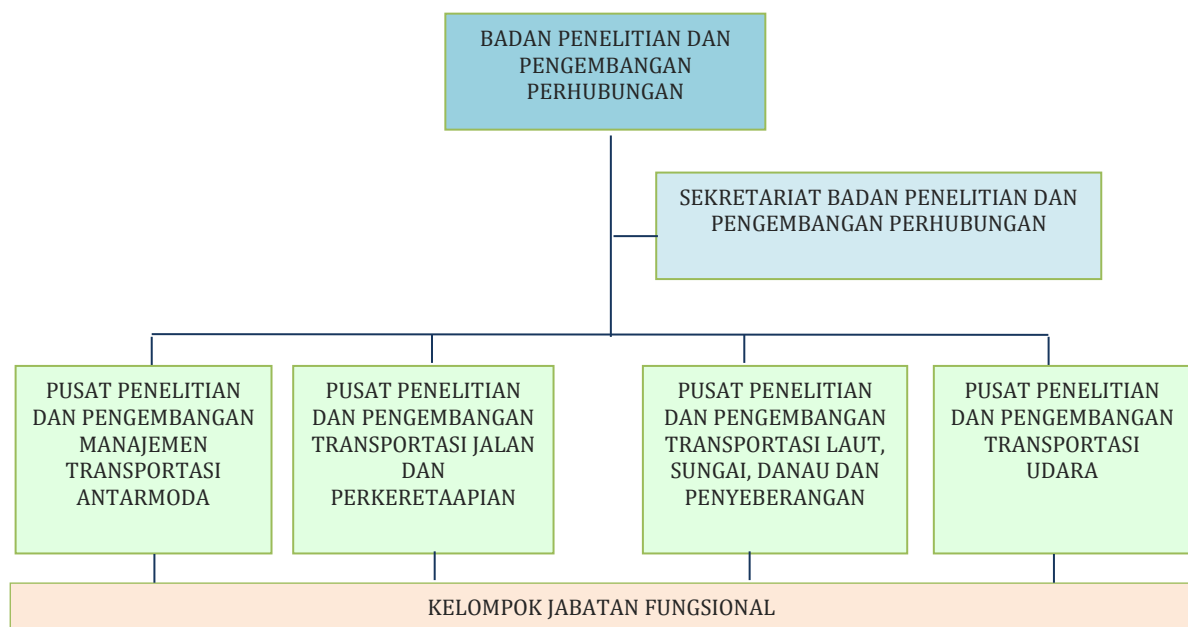
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi berdasarkan **Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 86 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 189 Tahun 2015** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan **fungsi**:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi, dan kerjasama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagaimana bagan berikut:



Struktur Organisasi Badan Litbang Perhubungan

Tugas dan fungsi sekretariat badan dan pusat–pusat litbang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Tugas:

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif penelitian dan pengembangan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran serta administrasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan, dan transportasi udara.
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatausahaan serta organisasi dan tata laksana badan penelitian dan pengembangan perhubungan;
- d. Pengelolaan data, hubungan masyarakat, hukum, serta publikasi hasil-hasil penelitian;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan serta kerumahtanggaan;
- f. Evaluasi dan pelaporan kegiatan badan penelitian.

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Tugas: Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidangnya.

Fungsi :

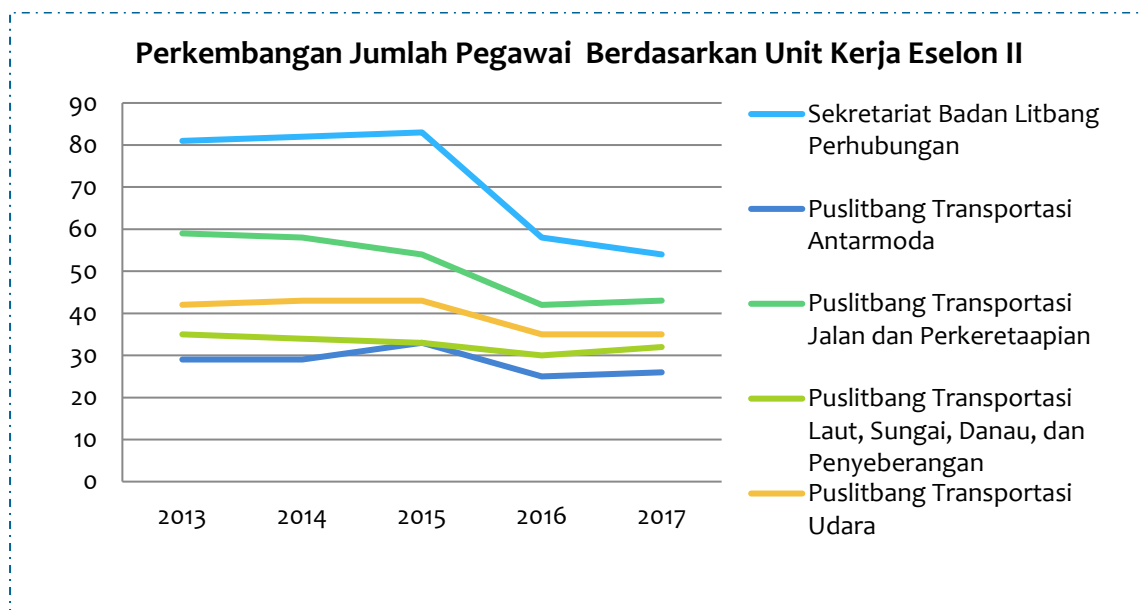
- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidangnya;
- b. Penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidangnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidangnya;
- d. Penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidangnya;
- e. Penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidangnya; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

KOMPOSISI PEGAWAI

Badan Litbang Perhubungan memiliki pegawai sejumlah **190** pegawai yang terbagi atas jabatan struktural dan jabatan fungsional.

1. STRUKTURAL

Jumlah pegawai Badan Litbang Perhubungan Tahun 2017 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya kecuali secara jumlah per-unit kerja Eselon II. Bagan berikut menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan jumlah pegawai yang cukup besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.



2. FUNGSIONAL

Pegawai dengan jabatan fungsional terbagi atas Jabatan Pelaksana Fungsional yang sebelumnya disebut sebagai Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana yang sebelumnya disebut sebagai Jabatan Fungsional Umum. Fungsional tertentu terdiri atas Fungsional Peneliti, Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa), dan Fungsional Pranata Humas.

Fungsional Tertentu

a. Peneliti

Jabatan Fungsional Peneliti merupakan jabatan karier PNS yang memungkinkan untuk mencapai jenjang pangkat/golongan sampai dengan Pembina Utama IV/e sesuai dengan jabatan yang diduduki berdasarkan angka kredit yang dimiliki JF Peneliti : tidak ada *inpassing* / penyesuaian langsung, tetapi melalui proses penilaian angka kredit dan standar kompetensi.

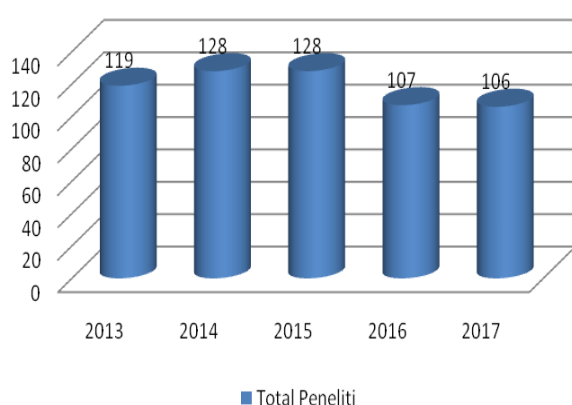
PNS Peneliti = Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah (**Kepmenpan KEP/128/M.Pan/9/2004**).

Berdasarkan **Peraturan Kepala Lembaga Penelitian Indonesia (PERKA LIPI) Nomor 1 Tahun 2016** tentang Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti. Kepakaran peneliti Badan Litbang Perhubungan terbagi menjadi lima bidang penelitian yaitu transportasi antarmoda, transportasi jalan, transportasi rel, transportasi air, dan transportasi udara.

Jumlah Fungsional Peneliti menurut Kepakaran Penelitian

NO.	KEPAKARAN PENELITI	JUMLAH PENELITI
1.	Transportasi Multimoda	22
2.	Transportasi Jalan	34
3.	Transportasi Rel	3
4.	Transportasi Air	22
5.	Transportasi Udara	25
Total		106

**PERKEMBANGAN JUMLAH PENELITI BADAN LITBANG
PERHUBUNGAN 2013-2017**

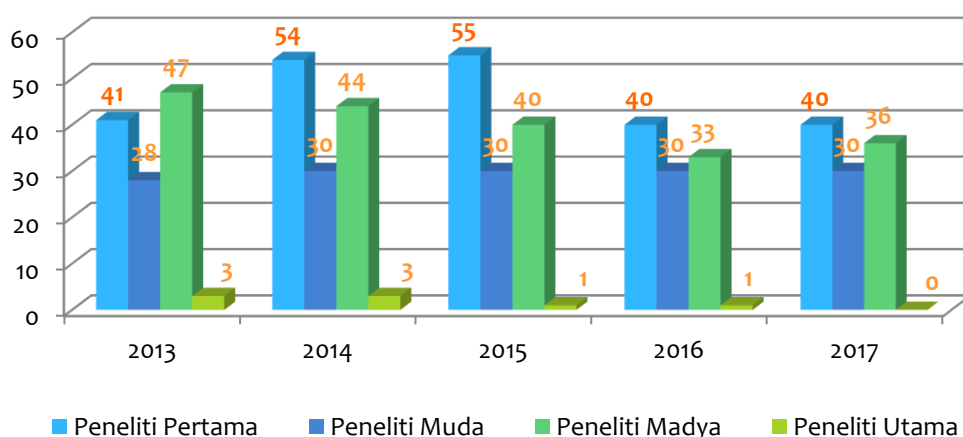


Komposisi Jabatan Fungsional Peneliti Berdasarkan Jabatan dan Bidang Penelitian

NO	JABATAN	BIDANG PENELITIAN				JUMLAH
		TRANSPORTASI MULTIMODA	TRANSPORTASI JALAN, KA	TRANSPORTASI AIR	TRANSPORTASI UDARA	
1.	Peneliti Pertama	6	16	10	9	44
2.	Peneliti Muda	10	7	3	8	28
3.	Peneliti Madya	6	12	9	7	34
4.	Peneliti Utama	-	-	-	-	-
JUMLAH		22	38	22	24	106

Peneliti Badan Litbang Perhubungan terdistribusi ke dalam 4 (empat) jenjang peneliti, yaitu Peneliti Utama, Peneliti Madya, Peneliti Muda, dan Peneliti Pertama. Pada tahun 2017 Badan Litbang Perhubungan tidak lagi memiliki Peneliti Utama dikarenakan Peneliti Utama telah memasuki masa pensiun. Perkembangan jumlah peneliti Badan Litbang Perhubungan berdasarkan jenjang jabatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada gambar berikut:

Peneliti Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan Jenjang Jabatan



b. Litkayasa

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan melalui Penyesuaian/ *inpassing* diatur dalam **Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 11 Tahun 2017**. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang selanjutnya disebut Teknisi Litkayasa adalah PNS pada instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada instansi pemerintah. Berikut komposisi Jabatan Fungsional Litkayasa di Badan Litbang Perhubungan Tahun 2017:

Komposisi Jabatan Fungsional Litkayasa

NO.	JABATAN	UNIT KERJA					JUMLAH
		Set. Badan	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Puslitbang Transportasi Jalan & KA	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Puslitbang Transportasi Udara	
1.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula	-	-	-	-	-	-
2.	Teknisi Litkayasa Pelaksana	1	1	1	1	2	6
3.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-	-
4.	Teknisi Litkayasa Penyelia	3	-	3	2	2	10
Jumlah		4	1	4	3	4	16

c. Pranata Humas

Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Hal ini diatur dalam **Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014**.

Jumlah tenaga Fungsional Pranata Humas Badan Litbang Perhubungan, sebagai berikut:

Jumlah Tenaga Fungsional Pranata Humas

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Pranata Humas Pelaksana Pertama	-
2.	Pranata Humas Pelaksana	-
3.	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	-
4.	Pranata Humas Penyelia	4
Jumlah		4

Jabatan Pelaksana

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pelaksana yang ada di Badan Litbang Perhubungan sesuai dengan **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2016**.

Jabatan Pelaksana di Badan Litbang Perhubungan

UNIT KERJA	JABATAN PELAKSANA	JUMLAH
Sekretariat Badan	Pengelola Administrasi Kepegawaian	2
	Sekretaris Pimpinan	1
	Analisis Organisasi dan Tatalaksana	1
	Penyusun Bahan Pembinaan Pegawai	1
	Penyusun Rencana Penelitian dan Pengembangan	1
	Penyusun Rencana Program dan Anggaran	1
	Penganalisis Data	2
	Pranata Humas Penyelia	4
	Pengolah Bahan Publikasi dan Penerbitan	1
	Teknisi	2
	Bendahara Pengeluaran	1
	Verifikator Keuangan	2
	Penata Laporan Keuangan	2
	Penyusun Program Kegiatan	1
	Pengadministrasi Perpajakan dan PNBPN	1
	Kegiatan Verifikasi SABMN	1
	Pengelola Serah Terima	1
	Pemroses Administrasi BMN	1
Puslitbang Transportasi Antarmoda	Bendahara	1
	Analisis Pengelola Kepegawaian	2
	Pengelola Keuangan	3
	Pengelola Kerumahtanggaan	1
	Penyusun Rencana	1
Puslitbang Transportasi Jalan dan KA	Pengelola Keuangan	3
	Analisis Pengelola Kepegawaian	1
	Pengelola Administrasi Penelitian	2
Puslitbang Transportasi Laut dan SDP	Pengumpul Bahan	1
	Penyusun Program Anggaran	1
	Pengelola Keuangan	2
Puslitbang Transportasi Udara	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	1
	Pengelola Keuangan	3
	Bendahara	1
JUMLAH		49

BAB II

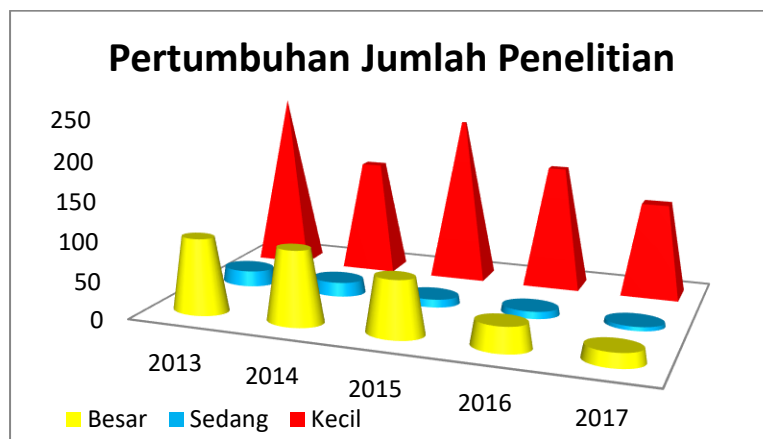
KEGIATAN PENELITIAN TRANSPORTASI



A.

KEGIATAN PENELITIAN TRANSPORTASI

Penelitian Badan Litbang Perhubungan didasarkan oleh pertimbangan konsep kebijakan nasional, perkembangan lingkungan strategis; mandat RPJP, RPJMN, Renstra Kementerian Perhubungan, Rencana Induk Riset Nasional; serta isu-isu strategis sektor transportasi.



Tema penelitian mengangkat isu strategis yang menjawab permasalahan transportasi dan dikelompokkan berdasarkan kepentingan *stakeholders*, yaitu naskah akademis, usulan daerah melalui klinik transportasi, dan jenis penelitian aplikatif (*model/ design/ prototype*).

Pertumbuhan Jumlah Penelitian Badan Litbang Perhubungan

Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2018

Jumlah Penelitian Pada Tahun 2017

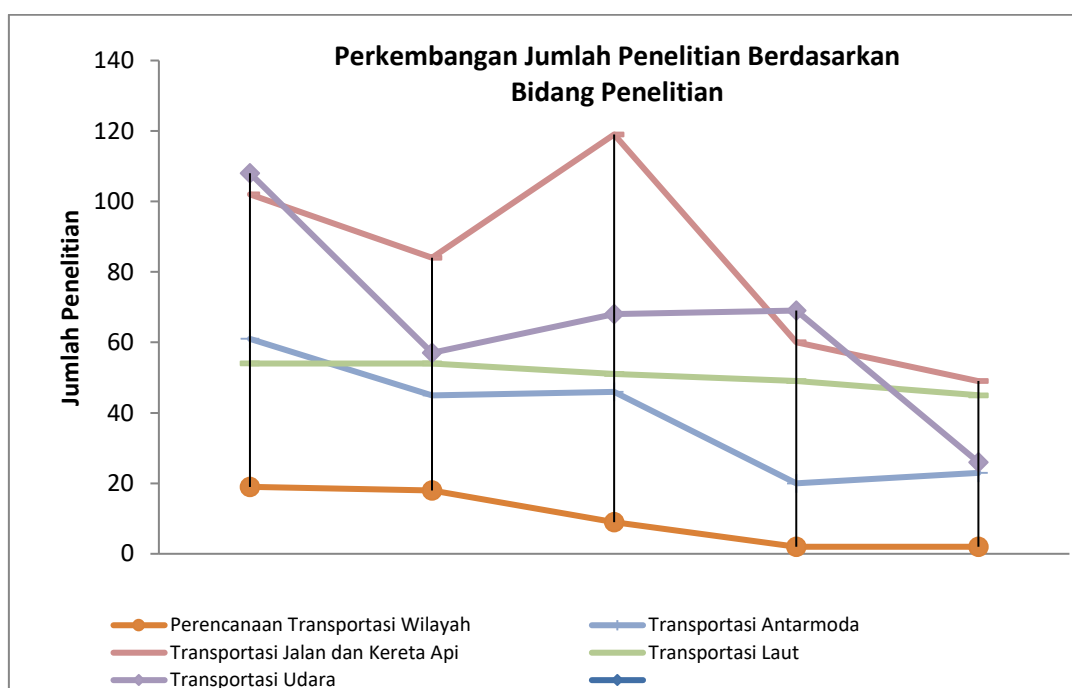
No	Bidang Penelitian	Studi			Jumlah
		Besar	Sedang	Kecil	
1.	Perencanaan Transportasi Wilayah	2	-	-	2
2.	Transportasi Antarmoda	3	-	20	23
3.	Transportasi Jalan dan Kereta Api	-	4	45	49
4.	Transportasi Laut, SDP	9	1	35	45
5.	Transportasi Udara	4	-	22	26
Jumlah		18	5	122	145

Sumber: Badan Litbang Perhubungan, Januari 2018

Perkembangan Jumlah Penelitian Berdasarkan Bidang Penelitian

No.	Bidang Penelitian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perencanaan Transportasi Wilayah	19	18	9	2	2
2.	Transportasi Antarmoda	61	45	46	20	23
3.	Transportasi Jalan dan Kereta Api	102	84	119	60	49
4.	Transportasi Laut	54	54	51	49	45
5.	Transportasi Udara	108	57	68	69	26
Jumlah		344	258	293	200	145

Sumber : Data Diolah, Januari 2018



Perkembangan Jumlah Penelitian Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan Bidang Penelitian

Sumber : Data diolah, Januari 2018

~~Badan Litbang Perhubungan telah menghasilkan sebanyak 115 rekomendasi kebijakan dari 145~~ penelitian yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017. Rekomendasi kebijakan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang penelitian, yaitu rekomendasi kebijakan di bidang transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan, transportasi udara dan kebijakan perencanaan transportasi wilayah. Beberapa judul penelitian yang dilaksanakan berdasarkan bidang transportasi, antara lain:

1. TRANSPORTASI ANTARMODA

STUDI BESAR

- a. Evaluasi Metodologi dan Uji Coba Survei Pergerakan Orang
- b. Identifikasi Kinerja *Logistics Performance Index* (LPI) Di Indonesia
- c. Review Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi

STUDI SEDANG

STUDI KECIL

- a. Integrasi Prasarana Transportasi di Pelabuhan Benoa Dalam Mendukung Pengembangan Transportasi Antarmoda;
- b. Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Kepulauan Seribu;
- c. Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Tanjung Kelayang Bangka Belitung;
- d. Analisis Pelayanan Alih Moda di Pelabuhan Tenggayu I Tarakan;
- e. Integrasi Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dan Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi di Lampung;
- f. Integrasi Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Danau Toba Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas;
- g. Integrasi Pelabuhan Lembar Dan Halte *Bus Rapid Transit* (BRT)/Angkutan Umum di NTB Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
- h. Integrasi Stasiun Padang Dan *Bus Rapid Transit* (BRT) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
- i. Integrasi Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan Halte Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
- j. Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur;
- k. Integrasi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
- l. Integrasi Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang dan Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
- m. Integrasi Stasiun Tanjungkarang dan Halte *Bus Rapid Transit* (BRT) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi Perkotaan di Kota Bandar Lampung;
- n. Integrasi Pelabuhan Kayangan NTB Dan BRT Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
- o. Integrasi Pelabuhan Gilimanuk Dan Shelter Angkutan Umum Dalam Peningkatan Pelayanan Transportasi di Kabupaten Jembrana, Bali;
- p. Integrasi Pelabuhan Padangbai dan Halte Bus Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;

- q. Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten;
- r. Integrasi Pelabuhan Belawan dan Halte Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
- s. Integrasi Pelabuhan Tanjung Emas dan Halte Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
- t. Integrasi Transportasi Antarmoda di Kawasan Destinasi Wisata Borobudur.

2. TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN

STUDI SEDANG

- a. Pengembangan Jaringan Jalan Untuk Kebutuhan Mobilitas Angkutan Barang Berdasarkan Hasil Survei ATTN
- b. Uji Simulasi *Crashworthiness* Pada Desain Rancang Bangun Karoseri Kendaraan Angkutan Penumpang di Indonesia
- c. Studi Penerapan *Green Zone* di Wilayah Pemukiman dan Kawasan Wisata
- d. Studi Penyusunan Rencana Induk Transportasi SARBAGITA dan KEDUNGSEPUR

STUDI KECIL

- a. Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Kediri
- b. Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Boyolali
- c. Audit Jalan Guna Mengurangi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Boyolali
- d. Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Tasikmalaya
- e. Kajian Akses Dan Pelayanan Transportasi Menuju Destinasi Wisata Tanjung Lesung Banten
- f. Analisis Sistem Jaringan Transportasi Kota Serang
- g. Mekanisme Subsidi Angkutan Umum Bagi Pelajar Di Kabupaten Pasuruan
- h. Kajian Kebutuhan Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Di Kota Kendari
- i. Kajian Kebijakan Tarif dan Kuota Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- j. Persepsi Terhadap Keberadaan dan Pelayanan Taxi online
- k. Optimalisasi Terminal Tipe B Di Kabupaten Siak
- l. Studi Analisis Dan Evaluasi Penyelenggaraan Mudik Gratis Kereta Api Dan Bus Angkutan Lebaran Tahun 2017
- m. Penataan Pasar Tumpah Guna Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Pada Angkutan Lebaran 2017 Di Jalur Pantai Utara Jawa Barat
- n. Persepsi Pengguna Kereta Api Pada Angkutan Lebaran Tahun 2017
- o. Monitoring Dan Evaluasi Terminal Tipe A Leuwipanjang- Bandung Dan Indihiang-Tasikmalaya Pada Musim Angkutan Lebaran 2017
- p. Profil Transportasi Jalan Dan Kereta Api Di Provinsi Gorontalo
- q. Studi Penyusunan Profil Transportasi Jalan Dan Perkeretaapian Provinsi Bengkulu
- r. Penyusunan Naskah Akademis Sistranas Bidang Transportasi Perkeretaapian
- s. Penyusunan Naskah Akademis Sistranas Bidang Transportasi Jalan
- t. Studi Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Banyuwangi
- u. Studi Aksesibilitas Menuju Destinasi Wisata Di Pulau Morotai

- v. Kajian Akses Dan Pelayanan Transportasi Menuju Destinasi Wisata Pantai Mandalika Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- w. Kajian Kebutuhan Angkutan Taksi Di Kabupaten Tasikmalaya
- x. Kajian Tindak Lanjut PM 26 Tahun 2017 Diluar Tarif dan Kuota
- y. Perencanaan Jalur Sepeda Di Kota Blitar
- z. Studi Aksesibilitas Menuju Destinasi Wisata Di Danau Toba
- aa. Media Sosialisasi Keselamatan
- bb. Studi Penataan Parkir Di Wilayah Central Business District Kota Pati
- cc. Studi Kelayakan Zoss Pada Ruas Jalan Pantura Kabupaten Pati
- dd. Pengembangan Trayek Angkutan Pedesaan Di Wilayah Kabupaten Jember
- ee. Studi Pengembangan Sistem Logistik Kabupaten Sleman Untuk Mendukung Implementasi *Smart Regency*
- ff. Kajian Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kab.Kediri
- gg. Pengembangan Angkutan Jalan Perintis Riau
- hh. Evaluasi Pemudik Sepeda Motor Pada Lebaran Tahun 2017
- ii. Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Terminal Tipe A Mangkang Semarang, Terminal Tirtonadi Surakarta Dan Terminal Bulupitu Purwokerto Pada Masa Lebaran 2017
- jj. Studi Monitoring Dan Evaluasi Terminal Tipe A Tambak Osowilangun-Surabaya, Purabaya-Sidoarjo Dan Giwangan-Yogyakarta Pada Masa Angkutan Lebaran 2017
- kk. Survey Transportasi Asal Tujuan Penumpang Kabupaten Sumbawa Dalam Mendukung Rencana Induk Transportasi Kab. Sumbawa
- ll. Survey Transportasi Asal Tujuan Barang Kabupaten Sumbawa Dalam Mendukung Rencana Induk Transportasi Kab. Sumbawa
- mm. Perhitungan Volume lalu lintas dan kinerja ruas jalan di wilayah Sarbagita dan sekitarnya
- nn. Kajian Pengembangan Transportasi di Daerah Perbatasan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- oo. Kajian Pengembangan Transportasi di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat
- pp. Kajian Kebutuhan fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Di Kab.Brebes
- qq. Kinerja Pengoperasian Bus BRT/Aglomerasi bantuan Pemerintah/ DAMRI/Bandung
- rr. Kajian Pengembangan Transportasi di daerah Perbatasan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- ss. Kajian Pengembangan Transportasi di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat

3. TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

STUDI BESAR

- Studi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau.
- Studi Rencana Induk Pelabuhan Danau Onan Runggu, Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.
- Studi Rencana Induk Pelabuhan Danau Sipingga, Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.



Pelaksanaan Survei Teknis di Pelabuhan Sipingga

- Studi Rencana Induk Pelabuhan Sungai Durian Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
- Studi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).



Pelaksanaan Survei Teknis Penyusunan RIP Sabu Raijua

- Studi Optimalisasi Program Tol Laut
- Studi Rencana Induk Pelabuhan Laut Wosu Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah



Pengukuran Arus dan Pengambilan Sedimen di Lokasi Pelabuhan Wosu

- h. Studi Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Terminal Konvensional
- i. *Basic Design* dan *Keyplan* Kapal *Feeder* untuk Mendukung Pelayanan Tol Laut di Wilayah Maluku Utara.



Kapal LCT ukuran 500 DWT Sebagai *Feeder* Kapal Tol Laut

STUDI SEDANG

- a. Kajian Resiko Pelayaran di APBS didasarkan pada Data Pergerakan Lalu Lintas Kapal

STUDI KECIL

- a. Kajian Pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL)
- b. Kajian Prioritas Pengembangan Pelabuhan di Pulau Bunguruan Kabupaten Natuna
- a. Kajian Potret Sebaran Pelabuhan di Papua
- b. Kajian Pemberdayaan Pelayaran Rakyat
- c. Kajian Potret Sebaran Pelabuhan di Sulawesi
- d. Kajian Profil Transportasi Laut dan Penyeberangan di Provinsi Gorontalo
- e. Kajian Profil Transportasi Laut dan Penyeberangan di Provinsi Bengkulu
- f. Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pandu Laut Dalam (*Deep Sea Pilot*) di Selat Malaka-Selat Singapura
- g. Kajian Pengoperasian Kapal *Roll On Roll Off* (RoRo) untuk Penyeberangan Lintas Jakarta Surabaya Lombok
- h. Kajian Pengoperasian Kapal *Roll On Roll Off* (RoRo) untuk Penyeberangan Lintas Jakarta Panjang
- i. Kajian Evaluasi Lintas Penyeberangan Merak Bakauheni
- j. Kajian *Indonesia National Single Windows* (INSW) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait Inaportnet di Pelabuhan-Pelabuhan Besar (6 Pelabuhan Utama)
- k. Kajian Pola Pendanaan Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau
- l. Kajian Pengelolaan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk kepentingan Sendiri (TUKS)
- m. Kajian Potret Dukungan Transportasi Laut dan Danau terhadap 10 Destinasi Wisata (Studi Kasus: Wakatobi)
- n. Kajian Pola Pemberian Insentif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Kapal-Kapal Besar Generasi IV dan Kapal *Cruise*
- o. Kajian Pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
- p. Kajian Pengembangan Pelabuhan Salakan di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
- q. Kajian Kelayakan Pengembangan Pelabuhan Muntok Terminal Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat

- r. Kajian Usulan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Martini (Tiptop) Biak Numfor
- s. Kajian Pembangunan Pelabuhan Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua
- t. Kajian Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Regional Soasio/Goto di Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan
- u. Kajian Pengembangan Pelabuhan Rum di Kecamatan Tidore Utaa Kota Tidore Kepulauan
- v. Kajian Revitalisasi Pelabuhan Rakyat Lewoleba Kabupaten Lembata, NTT
- w. Kajian Kebutuhan Rehabilitasi Pelabuhan Margasari di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan
- x. Kajian Pembangunan Pelabuhan Lato di Kabuapten Flores Timur
- y. Kajian Usulan Pembangunan Jetty Apung di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- z. Kajian Kebutuhan Penambahan Rute Pelayaran di Kabupaten Nagakeo, Propinsi NTT
- aa. Kajian Kelayakan Pelabuhan Mesuji untuk Masuk dalam Trayek Tol Laut
- bb. Kajian Kebutuhan Pengembangan Dermaga Kapal Penumpang di Pelabuhan Nunukan
- cc. Kajian Kebutuhan Peralatan Keselamatan Pelayaran Rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- dd. Kajian Pengembangan Pelabuhan Kelapis/Malinau untuk Kegiatan Bongkar Muat
- ee. Kajian Kebutuhan Perbaikan Dermaga PELRA di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan
- ff. Kajian Kemanfaatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa di Kabupaten Wakatobi
- gg. Kajian Kebutuhan Kapal Khusus Angkutan Ternak yang Melayani Pantai Barat Sulawesi Tengah dengan Pulau Kalimantan

4. TRANSPORTASI UDARA

STUDI BESAR

- a. Studi Pemilihan Tipe Pesawat Udara dan Pembuatan *Hub and Spoke* Bandar Udara untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik di Papua;
- b. Penelitian Evaluasi Kinerja Otoritas Bandar Udara I Sampai Dengan Wilayah X Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara;
- c. Penelitian Evaluasi Kinerja Sekolah Penerbangan Sesuai dengan CASR 141 di Indonesia.
- d. Penelitian Sarana dan Prasarana Serta Rute Penerbangan Penerbangan di Wilayah Jawa Bagian Selatan;

STUDI SEDANG

-

STUDI KECIL

- a. Optimalisasi Bandar Udara Adi Soemarmo Solo melalui Peningkatan Konektivitas antara Solo dan Yogyakarta dengan Angkutan Kereta Api Khusus Bandar Udara;
- b. Evaluasi Fasilitas Prasarana Logistik/Kargo guna Mendukung Program Penurunan Disparitas Harga di Bandar Udara Sentani Jayapura;
- c. Implementasi Program Keamanan Penerbangan (AOSP) pada Maskapai Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Mentari Airlines, dan Citilink Indonesia yang Beroperasi di Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- d. Pemenuhan Kriteria Bandar Udara Komodo Labuan Bajo untuk Peningkatan Status dari Bandar Udara Domestik menjadi Bandar Udara Internasional;

- e. Penerapan *Nasional Single Windows (NSW)* Bandar Udara (Airportnet) sebagai Upaya Peningkatan Layanan dan Kelancaran Arus Barang Ekspor-Impor;
- f. Pola *Public-Private Partnership (PPP)* dalam Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia untuk Mendukung Transportasi Udara Berkelanjutan;
- g. Pemenuhan Standar Regulasi untuk Pengoperasian Pesawat Udara khususnya dalam Melaksanakan Pilot Recurrent Simulator Training;
- h. *Upgrading* dan Penyesuaian Standar Peralatan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Sentani Jayapura dan Bandar Udara Mopah Merauke;
- i. Kebutuhan *Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)* dengan Pola KSO antara GMF-AA dan MMF untuk Perawatan Pesawat Udara Kategori Normal dan Komuter di Indonesia khusus Indonesia Bagian Timur;
- j. Evaluasi terhadap Kriteria Pesawat Udara yang mengalami Penuaan (*Aging Aircraft*);
- k. Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu dalam Mendukung *Visit* Bengkulu 2020;
- l. Standarisasi dan Kinerja Sekolah Penerbangan untuk Pendidikan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Controller*);
- m. Pengelolaan *General Aviation Terminal (GAT)* di Indonesia;
- n. Pembangunan Bandar Udara Kulon Progo Yogyakarta Ditinjau dari Tataan Kebandarudaraan dan Aspek Keselamatan Penerbangan;
- o. Pengembangan Bandar Udara Adi Soemarmo Sebagai Bandar Udara Aerotropolis (*Airport City*);
- p. Kebutuhan Jumlah Personel yang Berlisensi (Sertifikat Kecakapan) untuk Pengoperasian Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (*GSE Operator*) di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
- q. Pembangunan Depo Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Pesawat Udara (DPPU) untuk Memenuhi Kebutuhan Standar Keselamatan Penerbangan di Papua;
- r. Kajian Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo Wamena di Provinsi Papua;
- s. Kajian Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo Timika di Provinsi Papua;
- t. Kajian Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo Yahukimo di Provinsi Papua;
- u. Kajian Penyusunan Profile Transportasi Udara Provinsi Bengkulu;
- v. Kajian Penyusunan Profile Transportasi Udara Provinsi Gorontalo.

5. PENELITIAN BIDANG KEBIJAKAN PERENCANAAN TRANSPORTASI WILAYAH

- a. Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Boven Digoel.

B.

PENELITIAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan transportasi yang tepat sasaran, kegiatan penelitian Badan Litbang Perhubungan didasarkan pada isu-isu strategis sektor transportasi terkini. Secara lebih khusus pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan mengacu pada arahan direktif Presiden, penugasan Menteri Perhubungan dan berdasarkan permintaan/usulan daerah. Pelaksanaan penelitian di lingkungan Badan Litbang Perhubungan bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan naskah akademis, menjawab permasalahan transportasi serta menanggapi isu-isu strategis dan aktual di bidang transportasi.

1. PENELITIAN BIDANG TRANSPORTASI ANTARMODA



Penyusunan Naskah Akademik RUU Sistem Transportasi Nasional



Adapun sasaran yang akan diwujudkan melalui RUU Sistranas adalah tersusunnya sistem transportasi nasional yang dilengkapi dengan prinsip-prinsip penyelenggaraannya yang menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem transportasi, dengan arah pengaturan sebagai berikut:

- ✓ Memperjelas komponen sistem transportasi nasional;
- ✓ Membagi penyelenggaraan sistem transportasi nasional pada setiap wilayah pemerintah, yakni Tatranas, Tatrawilm, Tatalok, dan Tataran transportasi perkotaan (karakter khusus);
- ✓ Mengatur model perencanaan yang mengharmonisasikan rencana induk tiap sektor transportasi dan rencana transportasi pada setiap tataran transportasi;
- ✓ Memperjelas model integrasi sistem transportasi;
- ✓ Mengatur pengembangan sistem informasi dan telekomunikasi sumber daya manusia, dan peran serta masyarakat, dan;
- ✓ Memperkuat pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil kesimpulan RDP Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR-RI tanggal 19 Juli 2017 bahwa Komisi V DPR-RI bersama Sekretariat Jenderal dan Badan Litbang Perhubungan sepakat untuk mendukung Penyusunan Naskah Akademik RUU Sistranas yang menjadi inisiatif DPR.

Uji Simulasi *Crashworthiness* Pada Desain Rancang Bangun Karoseri Kendaraan Angkutan Penumpang di Indonesia

Penelitian tentang uji laik tabrak / *crashworthiness* untuk kendaraan angkutan penumpang (bus) merupakan permintaan dari KNKT yang dilatarbelakangi kecelakaan bus Rukun Sayur di ruas tol Cipali. Dimana terdapat 11 korban jiwa akibat terhimpit *bus superstructure* (struktur utama = konstruksi yang mencakup semua bagian-bagian yang terletak di atas komponen struktur seperti rangka, kuda-kuda, pilar, dsb.) yang mengalami deformasi/ perubahan bentuk setelah bus terguling (*roll over*).



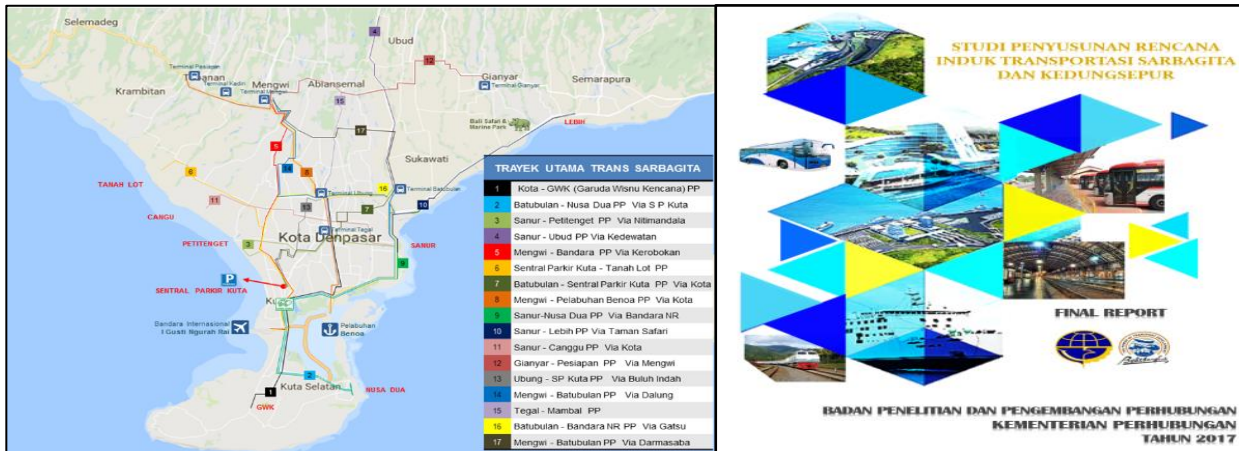
Rekomendasi Studi:

Regulasi keamanan struktur bus dalam mode kecelakaan berguling yang umum digunakan adalah UNECE R66 di Eropa dan FMVSS 216 di Amerika Serikat. Struktur regulasi UNECE R66 terdiri dari satu buah dokumen berisi ruang lingkup dari regulasi, definisi istilah yang digunakan, metode persetujuan dan pertidaksetujuan, serta lampiran yang berisi prosedur pengujian. FMVSS 216 terbagi menjadi dua dokumen yaitu *Code of Federal Regulation* (CFR) dan *Test Procedure* (TP); Usulan regulasi untuk keamanan struktur bus dalam mode kecelakaan berguling di Indonesia akan diajukan dalam bentuk peraturan menteri dengan mengadaptasi UNECE R66 dan FMVSS 216; Regulasi ini berlaku untuk kendaraan bus satu tingkat dengan jumlah penumpang lebih dari 22 orang, duduk maupun berdiri, tidak termasuk pengemudi.



<https://www.slideshare.net/MRizkaFaisalR>

Studi Penyusunan Rencana Induk Transportasi Denpasar – Bandung – Gianyar – Tabanan (SARBAGITA) dan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR)



Penelitian tentang rencana induk transportasi SARBAGITA dan KEDUNGSEPUR adalah permintaan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Provinsi Bali. Kedua instansi tersebut menginginkan adanya rencana induk semacam RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) untuk daerah aglomerasi di Jawa Tengah (Kedungsepur) dan di Bali (Sarbagita). Tujuan dilakukannya studi rencana induk transportasi ini untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana pengembangan transportasi di wilayah aglomerasi.

Rekomendasi Studi di antaranya yaitu:

- 1) Penetapan koridor utama transportasi;
- 2) Perencanaan standar aksesibilitas dan konektifitas simpul transportasi;
- 3) *Technical assistance* evaluasi Perda dan Aturan Daerah;
- 4) Pemeliharaan, Operasi, dan pengembangan Infrastruktur Koridor Utama O&M APILL, perkerasan, marka, fasilitas *pedestrian*, rambu dan drainase jalan;
- 5) Detail Rencana Pengembangan Arsitektur dan Jaringan Sistem ITS (*Intellegent Transport System*);
- 6) Penyusunan model kelembagaan dan koordinasi penyelenggaraan simpul transportasi.

Kajian Tindak Lanjut PM 26 Tahun 2017 di Luar Tarif dan Kuota

Latar belakang kajian “Tindak lanjut PM 26 tahun 2017” adalah arahan dari Menteri Perhubungan untuk melakukan analisa terhadap keberadaan angkutan sewa penumpang non trayek yang bersifat online, dimana peraturan perundangan yang ada saat ini belum mengakomodasi legalitas operasional angkutan sewa *online*. Untuk itu, diperlukan kajian yang bersifat intensif dan komprehensif mengenai dampak dan teknis operasional di lapangan agar didapatkan solusi yang saling menguntungkan antara pengemudi angkutan sewa *online* dan pengemudi angkutan regular.



Rekomendasi Studi:

Bekerja sama dengan Pemda untuk memberikan fasilitas dan kemudahan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; Membantu perusahaan penyedia aplikasi taksi *online* untuk meyakinkan pemilik mobil dalam menyetujui balik nama STNK atas nama lembaga hukum (perusahaan mitra penyedia aplikasi taksi *online*); Memfasilitasi kerja sama perusahaan asuransi dengan penyedia aplikasi taksi *online* dan para pengemudi; Membuat standar minimal bengkel dan *pool* yang harus dimiliki perusahaan transportasi.

3. PENELITIAN BIDANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Studi Optimalisasi Program Tol Laut Angkutan Penumpang di Indonesia

Program Tol Laut adalah program yang digagas Presiden dan menjadi program unggulan Kementerian Perhubungan. Program Tol Laut dilaksanakan untuk mendukung konektivitas antar wilayah serta mengurangi disparitas harga antara wilayah Barat dan wilayah Timur Indonesia. Badan Litbang Perhubungan cq Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan diberikan penugasan oleh Menteri Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait program tol laut. Untuk itu, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pengambilan kebijakan untuk mendukung konektivitas antar wilayah serta mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.

Rekomendasi Studi:

1. Aspek jaringan: Perlu penambahan jaringan/ trayek Tol Laut khususnya pada daerah perbatasan, terluar, terisolir, dan tertinggal, perlu dibangun pelabuhan hub pada jaringan Tol Laut, dan subsidi pada angkutan lanjutan;
2. Aspek sarana: perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tol laut diharapkan menyediakan kapal yang sesuai dengan trayek yang dilayani, penggunaan kontainer dengan ukuran < 20 feet, dan perlu standar keselamatan angkutan barang;
3. Aspek prasarana: pelabuhan yang disinggahi oleh kapal Tol Laut harus siap dalam menyediakan alat bongkar muat, lapangan penumpukan, dan gudang serta didukung SDM yang memadai.



Kajian Pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL)

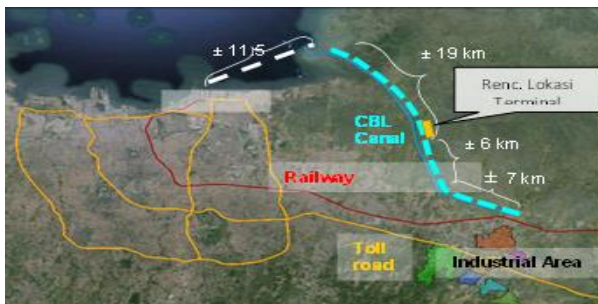
Dilatarbelakangi kepadatan karena berbagai proyek infrastruktur yang berjalan di ruas jalan tol Cikampek – Jakarta, maka PT. Pelindo II berencana membangun kanal CBL. Untuk itu, Badan Litbang Perhubungan cq Puslitbang Transportasi Laut, SDP mendapatkan penugasan dari Menteri Perhubungan untuk mengkaji hal tersebut sehingga dapat memberikan rekomendasi terkait dengan rencana pembangunan kanal CBL.

Rekomendasi Studi:

1. Rencana pembangunan kanal Cikarang Bekasi Laut perlu dibahas antar kementerian karena ini proyek yang memerlukan dana cukup besar dan waktu membuat *Feasibility Study (FS)* belum mempertimbangkan moda lain dan pembangunan pelabuhan Patimban;
2. Perlu dilakukan penetapan lokasi atau titik pelabuhan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan usulan dari pemrakarsa yang didukung dengan *FS*, *Survey Investigation Design (SID)* dan *Detail Engineering Design (DID)*, *masterplan*, AMDAL serta persetujuan dari pemda dan kementerian yang terkait;
3. Rencana pembangunan kanal Cikarang Bekasi Laut sebagai jalur transportasi harus tetap mempertimbangkan fungsi dari kanal tersebut adalah sebagai pengendali banjir untuk daerah Bekasi dan sekitarnya.



Kanal CBL yang Menuju Muara ke Tanjung Priok



Kajian Pengelolaan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Dalam rangka peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang telah ditetapkan dalam target dan prioritas pembangunan RAPBN Tahun 2017, Kementerian Perhubungan berencana untuk menyempurnakan aturan penggunaan tersus dan TUKS. Untuk itu, Badan Litbang Perhubungan cq Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan mendapatkan penugasan dari Menteri Perhubungan untuk melaksanakan kajian evaluasi mengenai pengelolaan Tersus dan TUKS.



Rekomendasi Studi:

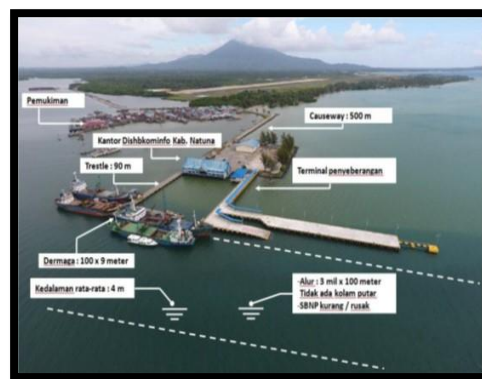
1. Pihak penyelenggara pelabuhan agar proaktif bersama dengan instansi terkait untuk mendorong pengelola Tersus/TUKS agar dapat melengkapi persyaratan perijinan yang masih kurang;
2. Terkait dengan kurangnya SDM penyelenggara pelabuhan, diupayakan dapat mengangkat tenaga honorer khususnya di daerah Tersus/ TUKS tersebut;
3. Penyelenggara pelabuhan agar dapat menjadi mediator antara pengelola Tersus/ TUKS yang memiliki *smelter* dengan pengelola Tersus/ TUKS yang tidak memiliki *smelter* agar hasil galian tambang dapat diangkut ke lokasi Tersus/ TUKS yang memiliki *smelter*;
4. Untuk meningkatkan PNBPN di Kantor Pelabuhan Batam perlu meninjau kembali dasar hukum yang digunakan oleh BP Batam yang belum selesai.

Kajian Prioritas Pengembangan Pelabuhan di Pulau Bunguruan Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura direncanakan akan menjadi salah satu gerbang pintu masuk ke wilayah Indonesia. Sejalan dengan Nawa Cita, bahwa pemerataan pembangunan itu wajib, Kementerian Perhubungan berupaya untuk memfokuskan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi pada daerah tertinggal, pedalaman, pulau terdepan dan pulau terkecil. Untuk itu, Badan Litbang Perhubungan cq Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan mendapatkan penugasan untuk melakukan pengkajian mengenai prioritas pengembangan pelabuhan di Pulau Bunguruan.

Rekomendasi Studi:

1. Pengembangan fasilitas Pelabuhan Selat Lampa perlu diprioritaskan untuk pengadaan terminal penumpang.
2. Percepatan pembangunan jalan alternatif Selat Lampa-Simpang Sekunyam.
3. Perlu koordinasi antar instansi terutama dengan Kemnenterian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut untuk sinkronisasi rencana induk pelabuhan.
4. Perlu dukungan dari Pemda untuk penambahan lahan di sisi darat serta dukungan aspek legal dari Kementerian Lingkungan Hidup.



4. PENELITIAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA



Studi Pemilihan Tipe Pesawat Udara dan Pembuatan *Hub and Spoke* (Pengumpul dan Pengumpan) Bandar Udara untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik di Papua

Program Tol/ Jembatan Udara sebagai penyambung atau lanjutan dari Program Tol Laut oleh pemerintah dalam mendukung pendistribusian logistik ke daerah-daerah terpencil di Papua. Kementerian Perhubungan tengah merancang Program Jembatan Udara untuk pendistribusian logistik ke daerah-daerah terpencil, terutama di Papua. Melalui program ini diharapkan disparitas harga barang dan kebutuhan pokok lainnya yang demikian tinggi dapat ditekan sehingga masyarakat dapat memperoleh semua kebutuhan bahan pokok dengan harga-harga yang seimbang dengan wilayah lain di Indonesia. Sejalan dengan kebijakan tol udara tersebut pemilihan tipe dan jenis pesawat dan pembuatan *Hub and Spoke* (Pengumpul dan Pengumpan) bandar udara yang sesuai untuk memfasilitasi program tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini penting dilakukan karena pelaksanaan lalu lintas penerbangan atau navigasi penerbangan di kawasan Papua memiliki faktor yang sulit akibat kondisi alam yang bergunung-gunung dengan kondisi cuaca yang cepat berubah. Penerbangan hanya dapat dilakukan secara visual.

Rekomendasi Studi:

1. Usulan Bandara Baru yang direkomendasikan menjadi bandara *hub* yaitu: Mararena (Sarmi); Stevanus Rumbewas (Yapen); Ewer (Asmat).
2. Jaringan Distribusi Udara, Jalur distribusi kargo udara di provinsi Papua dikelompokkan menjadi lima zona, yaitu: Zona Jayapura (Sentani), Zona Merauke (Mopah), Zona Timika (Mozes Kilangin), Zona Nabire (Douw Aturure), Zona Sarmi (Mararena).
3. Pemilihan Tipe Pesawat yang ideal dengan kondisi topografi dan bandara di Papua yaitu: *DHC-Twin Otter* (DHC-6), *Cessna Grand Caravan* (C208), *Pilatus PC-Porter* (PC6P), *ATR 42* dan *ATR 72*, *Boeing 737-300* (B737-300).

Penelitian Sarana dan Prasarana serta Rute Penerbangan di Wilayah Jawa Bagian Selatan



FGD “Penelitian Sarana dan Prasarana serta Rute Penerbangan
di Wilayah Jawa Bagian Selatan”
Yogyakarta, 6 Desember 2017

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan *AIP Supplement* Nr. 39/17 tertanggal 17 Agustus 2017, tentang *Establishment of New Domestic ATS Route T1 in Jakarta and Ujung Pandang Flight Information Region*. Rencana pemerintah membuka rute penerbangan melalui Jalur Selatan Pulau Jawa, didasari pertimbangan utama bahwa jalur penerbangan sipil/ komersial di Jalur Utara sudah terlalu padat. Selama ini, rute penerbangan pesawat sipil/ komersial yang melintas di Pulau Jawa hanya menggunakan Jalur Utara. Kepadatan terjadi mengingat jalur itu dilintasi pesawat dengan tujuan atau asal kota-kota di Pulau Jawa menuju kota lainnya di pulau yang sama dan belum lagi pesawat yang menuju atau kembali ke kota-kota di luar Pulau Jawa.

Rekomendasi Studi, di antaranya yaitu:

1. Untuk menjaga Keamanan dan Keselamatan Penerbangan yang melalui Jalur Selatan Pulau Jawa (T1) diperlukan kesiapan Bandar udara Adi Sutjipto, Bandar udara Adi Sumarmo, Bandar udara Abdul Rachman Saleh, Malang, termasuk Pangkalan Udara Iswahyudi Madiun sebagai bandar udara *alternate*.
2. Hal-hal yang perlu dicatat untuk diakomodir agar penggunaan T1 lebih optimal di antaranya adalah:
 - a. Penerbangan tidak dibatasi hanya untuk penerbangan dari arah Timur saja, tetapi juga dibuka untuk arah Timur ke Barat;
 - b. Penerbangan tidak hanya untuk melayani penerbangan dari Jakarta saja, tetapi juga dari Bandung dan Yogyakarta;
 - c. Penerbangan tidak dibatasi hanya untuk penerbangan domestik, tetapi juga untuk penerbangan internasional.
3. Perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan antara unit terkait, yaitu Kementerian Perhubungan; Markas Besar TNI Angkatan Udara; AirNav Indonesia; Perusahaan Penerbangan; Bandar Udara; dan Instansi Pendukung terkait.

Penelitian Evaluasi Kinerja Sekolah Penerbangan Sesuai dengan *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 141* di Indonesia

Ketidakseimbangan *demand* (permintaan dari maskapai penerbangan) dan *supply* (jumlah lulusan tenaga penerbang/pilot) yang disebabkan *over supply*. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara masih terdapat banyak lulusan tenaga penerbang/ pilot pemula dari berbagai sekolah penerbang di Indonesia, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, yang belum terserap oleh maskapai penerbangan.



Rekomendasi Studi di antaranya yaitu:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berwenang terhadap pengawasan aspek operasional sekolah penerbang 141 di rekomendasikan agar segera melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai PM 22 tahun 2015 dan menunjuk inspektor yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah penerbang.
2. AC 141-01 / KP 510 tahun 2015 tentang Silabus dan Kurikulum Sekolah Penerbang (*syllabus and curriculum for pilot schools*) agar ditingkatkan statusnya menjadi peraturan menteri agar dapat dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan (*guidance*) yang mengikat.
3. Melihat bahwa jumlah lulusan sekolah penerbang yang terserap lebih banyak berasal dari sekolah penerbang yang mempunyai kerja sama atau berasal dari satu grup perusahaan dengan operator penerbangan, maka direkomendasikan bahwa sekolah penerbang menjalin kerja sama dengan operator penerbangan.

Penelitian Evaluasi Kinerja Otoritas Bandar Udara Wilayah I s.d. Wilayah X Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara

Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah I s.d wilayah X terkait dengan pelaksanaan kewenangan dari setiap kantor otoritas bandar udara sesuai yang diamanahkan dalam PM 41 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dan PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara serta KP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Rekomendasi Studi: Hasil evaluasi kinerja kantor otban belum berjalan maksimal karena pendelagasian wewenang belum sepenuhnya dilimpahkan oleh kantor pusat terutama dalam hal pengendalian atau sertifikasi sesuai ketentuan; Standar pembuatan regulasi termasuk revisi serta pembuatan *Standard Operating Procedure (SOP)* agar terjadi keseragaman harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan disosialisasikan untuk diimplementasikan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara.



Pembahasan Laporan Studi

“Evaluasi Kinerja Otoritas Bandar Udara Wilayah I s.d. Wilayah X Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara”

Grand Clarion Hotel Makassar, 19 September 2017

5. PENELITIAN BIDANG KEBIJAKAN PERENCANAAN TRANSPORTASI WILAYAH

Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Minahasa Selatan



Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan interwilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut melalui Nawa Cita, pemerintah mencanangkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, termasuk dalam sektor transportasi. Konektivitas nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/ RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu.

Pada Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Sulawesi Utara telah disusun secara simultan yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Tatralok Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2017. Dengan demikian diperoleh arah pembangunan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana yang dapat berperan dalam mendukung perekonomian wilayah dan mendorong pertumbuhan wilayah yang belum berkembang baik pada tataran lokal, provinsi hingga nasional/internasional.

Dengan demikian hasil yang diharapkan dari studi adalah tersusunnya naskah akademis perencanaan dan pengembangan jaringan transportasi kabupaten/kota dalam bentuk peta tematik, *desire line*, kebijakan, strategi, dan program pengembangan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi serta rancangan peraturan Bupati/ Walikota tentang Tatralok.

Rekomendasi Studi:

- 1) Jangka Pendek (2017 – 2022) merupakan Tahap Pemulihan Pelayanan Transportasi;
- 2) Jangka Menengah (2022 – 2027) dan (2028 – 2032) merupakan Tahap Pemanjatan Kinerja Pelayanan Transportasi;
- 3) Jangka Panjang (2033–2037) merupakan Tahap Peningkatan Pelayanan Transportasi.

Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Boven Digoel



Sistem transportasi pada dasarnya berfungsi untuk memfasilitasi kebutuhan pergerakan orang dan barang yang muncul karena adanya interaksi spasial antara beberapa aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang ada dalam suatu wilayah. Karenanya sistem transportasi harus dirancang agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi. Kabupaten Boven Digoel dalam hal ini membutuhkan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi untuk setiap moda guna mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien.

Maksud dari studi ini adalah menyusun arah pengembangan jaringan transportasi sejalan dengan Sistranas pada Tatralok yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pembangunan transportasi kabupaten/ kota secara kesisteman dalam lingkup lokal Kabupaten Boven Digoel yang dijabarkan dalam jaringan transportasi jalan, Sungai danau dan Penyeberangan, Laut dan Udara, yang masing-masingnya terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis.

Tujuan dari studi ini adalah tersedianya pedoman penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan transportasi lokal yang efektif, efisien dan terintegrasi dan menjadi acuan dalam pengembangan pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Boven Digoel.

Rekomendasi Studi:

- 1) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel perlu memetakan potensi-potensi daerah baik saat ini dan pengembangan ke depannya, berdasarkan potensi tersebut, maka pemerintah daerah dapat menetapkan program prioritas pembangunan transportasinya.
- 2) Peningkatan kinerja pelayanan transportasi di Kabupaten Boven Digoel perlu ditingkatkan dengan adanya regulasi mengenai trayek dan tarif yang di keluarkan secara legal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel.
- 3) Perlu koordinasi antar instansi baik tingkat kabupaten, provinsi dan kementerian terhadap upaya pembinaan dan peningkatan pelayanan transportasi di Kabupaten Boven Digoel.
- 4) Peningkatan SDM di sektor transportasi dengan mengikuti diklat, bimbingan teknis dan *workshop* terkait pembaharuan regulasi, standar pelayanan minimal (SPM) dll.

BAB III

KEGIATAN PENUNJANG



Program peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai didasari dari jenis jabatan fungsional yang dimiliki.

1. Pengembangan tenaga fungsional peneliti dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para peneliti Badan Litbang Perhubungan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Keikutsertaan dalam kursus-kursus jangka pendek dan jangka panjang baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Telah diselenggarakan pertemuan ilmiah di lingkungan Badan Litbang Perhubungan dalam bentuk ceramah ilmiah, *focus group discussion*, dan lokakarya;
 - c. Penyelenggaraan temu karya peneliti;
 - d. Keikutsertaan dalam seminar/*workshop* baik di dalam maupun luar negeri.
2. Pengembangan fungsional penelitian dan perekayasa (litkayasa) melalui jabatan fungsional teknisi litkayasa dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Keikutsertaan para teknisi litkayasa dalam pelaksanaan penelitian untuk membantu para peneliti khususnya pengumpulan data, membantu pengolahan data dan pengetikan hasil penelitian;
 - b. Mengikutsertakan Teknisi Litkayasa dalam pertemuan ilmiah, temu karya peneliti, diskusi ilmiah, seminar, dan *workshop* dan lain-lain.
3. Peningkatan kualitas pranata humas dengan mengikuti pelatihan kehumasan.
4. Pengembangan fungsional umum:
Sejak Tahun 2016 nomenklatur jabatan fungsional umum diganti dengan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Tercatat sebanyak 40 urusan pemerintahan (nomenklatur) yang didukung oleh jabatan pelaksana. Berbeda dengan jabatan fungsional tertentu, jabatan pelaksana tidak disyaratkan angka kredit. Pengembangan jabatan pelaksana diserahkan kepada koordinator dari masing-masing instansi pemerintah.
5. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sumber daya manusia Badan Litbang Perhubungan melalui kursus Bahasa Inggris.

Kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia Badan Litbang Perhubungan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dipaparkan dalam tabel berikut:

Kegiatan	Penyelenggara	Peserta
1. Diklat Formal/Diklat Lainnya		
a. Diklat Prajabatan Golongan II	Pusbang SDM Aparatur Perhubungan	7
2. Diklat Struktural/LEMHANAS		
a. Diklat Kepemimpinan Tk.IV	Pusbang SDM Aparatur Perhubungan	1
3. Diklat Teknis/Fungsional		
b. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pusbang SDM Aparatur Perhubungan	2
c. Diklat Fungsional (DF) Bendahara Pengeluaran	Pusbang SDM Aparatur Perhubungan	1
d. Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI	LIPI	2
e. Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan LIPI	LIPI	5
4. Diklat Lainnya		
a. Pelatihan Kompetensi (<i>Short Course</i>)		
1) Manajemen Stress	Biro Kepegawaian	1
2) Manajemen SDM	Biro Kepegawaian	2
3) Pelatihan Vissim/Vissum	Sekretariat Balitbanghub dengan PTV	28
4) Sistem Keselamatan Transportasi Kendaraan Darat	Puslitbang Jalan dan KA dengan ITB	5
5) Magang Peneliti di PT.INKA Madiun	Puslitbang Jalan dan KA dengan PT. INKA	16
6) Magang Peneliti di Proyek Pembangunan LRT Palembang	Puslitbang Jalan dan KA dengan Waskita	28
7) Diklat <i>Autocad</i>	Puslitbang Antarmoda dengan PT. Karya Bangun Citra Sarana	10
8) Diklat <i>Sketch Up</i>	Puslitbang Antarmoda dengan PT. Karya Bangun Citra Sarana	10
9) Diklat Bahasa Korea	LAN	1
10) Bimbingan Teknis Masterplan Pelabuhan;	Puslitbang Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan dengan Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI)	15
11) Pelatihan <i>Software</i> Mapinfo;	Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	12
12) Pelatihan Teknis Presentasi;	Puslitbang Laut, SDP dengan Pusdiklat BPK	21
13) Pendidikan dan Pelatihan Asesor;	BP2TD Bali	2
14) <i>The Profesional Training Program On Railway Policy and Safety for ASEAN</i>	Korean Railways	2
15) <i>Basic Aircraft Training</i> ;	Puslitbang Udara dengan PT. Karya Dirgantara Makmur	16
16) <i>Basic Aviation Knowledge Training</i> ;	Puslitbang Udara dengan PT. Terasis Erojaya	16
17) <i>Aviation Security and Dangerous Goods Training</i> ;	Puslitbang Udara dengan PT. Pradana Satya Jaya	12
18) <i>Human Factors, Safety Assessment, Realibility and Maintenability Training.</i>	Puslitbang Udara dengan PT. Kiad Gama Sakti	14
b. Ujian Dinas Tahun 2017	Biro Kepegawaian	3

Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2018



Kegiatan
peningkata
n dan
pengemban
gan SDM
Badan
Litbang



B.

SEMINAR/ FGD/ WORKSHOP

Kegiatan ilmiah dilakukan dalam rangka membahas suatu permasalahan melalui pakarnya, tentang isu-isu global, isu nasional dan isu strategis yang berkaitan dengan transportasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menghadirkan para pakar dan praktisi bidang transportasi baik dari institusi pemerintah seperti departemen teknis, BUMN, perguruan tinggi negeri maupun swasta yang profesional di bidangnya.

Kegiatan Seminar/ FGD/ Workshop

NO.	BIDANG	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Bidang Lintas Sektoral	9	6	10	11	8
2.	Bidang Antarmoda	8	7	10	3	6
3.	Bidang Jalan & Perkeretaapian	12	16	17	12	8
4.	Bidang Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	6	7	4	4
5.	Bidang Udara	7	6	29	3	4
JUMLAH		42	41	73	33	30

Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2018

Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) Orang Tahun 2017

FGD dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Informasi Teknologi (IT) dalam pelaksanaan Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional merupakan terobosan yang sangat baik, agar dapat lebih memberikan kemudahan informasi data kepada stakeholder terkait dan dapat memperbesar sampel/data dari populasi.
- b. Penggunaan metode *Big Data* telah disepakati untuk dilakukan dengan pertimbangan, antara lain: kejelasan output dan outcome kegiatan, metode yang digunakan, dan tingkat keakurasian data.
- c. Perlu dipertimbangkan mengenai kebutuhan akan data trafik dan data transportasi, untuk mengurangi bias data pergerakan orang.
- d. Apabila diperlukan, akan dibuat MoU sebagai payung hukum antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan perjanjian kerjasama antar Eselon I.

Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) Orang Tahun 2017

FGD dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2017 dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam konteks penelitian secara metodologi menggunakan big data seluler baru pertama kali dirancang dan akan digunakan di Indonesia;
- b. Secara metodologi menggunakan big data seluler yang diusulkan memenuhi rasionalitas ilmiah. Pengguna data seluler merupakan inovasi penerapan teknologi untuk penelitian yang memungkinkan dimanfaatkan untuk lingkup data pergerakan orang yang besar dan luas;
- c. Metode survei dengan menggunakan data seluler akan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan survei konvensional;
- d. Secara metodologi sudah bisa diterima namun dalam mekanisme pengadaan barang/jasa (data seluler), masih perlu dipertajam, klarifikasi dan juknis yang lebih detail dalam KAK mengenai aspek teknis satuan harga, agar dalam mekanisme pertanggungjawaban pengeluaran anggaran tidak menjadi permasalahan nantinya;
- e. Masih diperlukan pendalaman penggunaan, pemanfaatan data seluler agar tidak menyalahi peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Kegiatan survei ATTN Orang yang meliputi kegiatan sosialisasi, pengadaan bahan, pelaksanaan survei *traffic counting* pada ruas, wawancara penumpang di simpul-simpul transportasi, monitoring dan pengolahan data, serta mempertimbangkan waktu yang tersedia diperkirakan kurang memadai maka kegiatan survei ATTN Orang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap penajaman metodologi dan uji coba survei ATTN Orang yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahap pelaksanaan survei ATTN untuk Orang pada tahun 2018.

FGD dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 3 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan dibuat sebagai pengganti peraturan lainnya terkait pelaksanaan pembangunan yang didalamnya diatur tahapan pelaksanaan usulan proyek kegiatan. Berdasarkan PM tersebut Kementerian Keuangan mengeluarkan surat atau edaran yang berisi proyek-proyek pembangunan/anggaran harus dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dan sejak tahun 2014 Kementerian Perhubungan melalui Menteri Perhubungan mengamanatkan dan memerintahkan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk melakukan evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan khusus yang bernilai diatas 10 Milyar sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.
- b. Adapun Amanat dari Menteri Perhubungan sesuai pada butir a tersebut adalah:
 - 1) Investasi di sektor transportasi, untuk sub sektor Transportasi darat, laut, udara, Perkeretaapian maupun BPSPD sebelum diusulkan menjadi pagu definitif wajib terlebih dahulu dimintakan evaluasi tentang kemanfaatan investasi kepada Tim Evaluasi;
 - 2) Tim evaluasi akan memberikan rekomendasi sekurang-kurangnya: (1) Investasi yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan pelayanan publik dan/atau peningkatan upaya keselamatan dan keamanan transportasi. (2) Harga yang dianggarkan wajar dan terukur.
 - 3) Untuk evaluasi di bidang kemanfaatan, memiliki kriteria:
 - a) Pemenuhan kapasitas transportasi nasional, dengan indikator: kapasitas, konektivitas dan aksesibilitas.
 - b) Pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan, dengan indikator keselamatan dan keamanan.
 - c) Peningkatan pelayanan jasa transportasi, dengan indikator standar pelayanan dan alih teknologi
 - d) Evaluasi kemanfaatan yang dilakukan adalah evaluasi kemanfaatan investasi transportasi publik adalah kegiatan untuk mengevaluasi kemanfaatan dari investasi di sektor transportasi yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara:
 - e) Investasi yang dilakukan benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya serta mempunyai output dan *outcome* yang bermanfaat untuk penyelenggaraan transportasi;
 - f) Investasi akan memberikan kemanfaatan pelayanan publik dan/ atau untuk Peningkatan Upaya Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - g) Alokasi anggaran setiap kegiatan tidak melebihi nilai yang wajar dan dapat diukur akuntabilitasnya;
 - h) Evaluasi kemanfaatan investasi transportasi publik dimaksudkan untuk mengevaluasi kemanfaatan dari investasi di sektor transportasi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Evaluasi kemanfaatan investasi transportasi publik adalah penilaian terhadap 2 (dua) aspek, yaitu dukungan teknis dan kemanfaatan.
 - i) Untuk evaluasi di bidang dukungan teknis, dengan kriteria sarana dan prasarana pendukung, indikatornya adalah pemenuhan seluruh sarana dan prasarana pendukung utama serta seluruh sarana dan prasarana penunjang.

- c. Kementerian Perhubungan akan melaksanakan reviu terhadap usulan-usulan kegiatan, usulan tersebut terkait dengan proses penetapan anggaran Kementerian Perhubungan. Dalam reviu ini sudah ditetapkan 3 (tiga) unit eselon I yang akan melaksanakan penelitian reviu terhadap usulan-usulan kegiatan dimana Sekretariat Jenderal melalui Biro perencanaan terkait dengan program-program sesuai dengan Rensra atau RPJM; Inspektorat Jenderal terkait dengan kewajaran harga dan Badan Litbang mengevaluasi kemanfaatan terkait penilaian terhadap aspek kemanfaatan berdasarkan kriteria ketersediaan sarana & prasarana pendukung, konektivitas, serta keselamatan dan keamanan.
- d. Usulan Terkait dengan Penelitian Proses Penetapan Anggaran Kementerian Perhubungan melibatkan 3 (tiga) unit eselon I, sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Jenderal melakukan penelitian kebijakan perencanaan yang meliputi:
 - a) Kesesuaian dengan RPJMN & Renstra Kementerian Perhubungan;
 - b) Berpedoman pada Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c) Kesesuaian dengan RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten & Kota;
 - d) Kesesuaian dengan Rencana Induk (Masterplan) masing-masing moda;
 - e) Kepastian ketersediaan lahan dan jalan akses.
 - 2) Inspektorat Jenderal melakukan penelitian rencana anggaran biaya dan Reviu HPS yang meliputi:
 - a) Analisa Harga Satuan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
 - b) Kegiatan investasi diatas Rp. 10 (sepuluh) Miliar.
 - 3) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melakukan evaluasi manfaat, yaitu melakukan penilaian terhadap aspek kemanfaatan berdasarkan kriteria ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, konektivitas, serta keselamatan dan keamanan.
 - 4) Secara keseluruhan masalah peraturan pada awalnya keluar Instruksi Menteri dan hasilnya banyak yang merah dari berbagai kegiatan yang menyebabkan daya serap di Kementerian Perhubungan rendah, kemudian 2016 mengadakan evaluasi sudah menggunakan pagu indikatif sehingga dikasih waktu sebelum pagu anggaran harus sudah dilakukan evaluasi.
- e. Pada Bulan Juli Tahun 2017 Sekretariat Jenderal Perhubungan melalui Biro Perencanaan pada telah melakukan mereviu dalam rangka pembahasan perubahan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam draft perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 3 Tahun 2014 tersebut disebutkan dalam pasal 10 disebutkan bahwa dalam melaksanakan forum pembahasan terpadu terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh :

- 1) Sekretaris Jenderal;
 - 2) Inspektorat Jenderal; dan
 - 3) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- f. Dalam pasal 10 huruf c menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan evaluasi manfaat dengan ketentuan, standard, rencana atau norma yang telah ditetapkan, sebagai berikut;
- 1) Strategi dari pedoman evaluasi kemanfaatan investasi transportasi public adalah penilaian terhadap 2 (dua) aspek, yaitu dukungan teknis dan kemanfaatan;
 - 2) Kriteria-kriteria kemanfaatan investasi transportasi publik yang merupakan turunan dari ketiga aspek pada ayat (1), adalah: a) sarana dan pasarana pendukung; b) kemanfaatan bagi masyarakat; c) pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan; dan d) peningkatan pelayanan jasa transportasi;
 - 3) Indikator dari kemanfaatan investasi transportasi publik yang merupakan turunan dari 4 (empat) kriteria pada ayat (2), adalah: a) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan dan tahap pasca konstruksi; b) kapasitas; c) konektivitas; d) aksesibilitas; e) keselamatan; f) keamanan; standar pelayanan, dan g) alih teknologi
 - 4) Kelengkapan data dukung disampaikan paling lambat pada Bulan April.
- g. Point utama terakit tugas Badan Penelitian dan Perhubungan atas perubahan PM Perhubungan nomor 3 Tahun 2014, yaitu:
- 1) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melaksanakan identifikasi kemanfaatan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Identifikasi kemanfaatan dilakukan terhadap: a) strategi dari pedoman identifikasi kemanfaatan proyek inventasi transportasi adalah penilaian terhadap 2 (dua) aspek yaitu kelengkapan dukungan teknis dan kemanfaatannya.
 - 3) Reviu rencana kerja dan anggaran kegiatan pembangunan yang relevan dilaksanakan oleh Sekretaris jenderal dan Inspektorat Jenderal;
 - 4) Badan Penelitian dan pengembangan melakukan identifikasi kemanfaatan kegiatan pembangunan yang bernilai diatas 10 Milyar dan yang akan dilaksanakan.
 - 5) Untuk Badan Litbang dalam RPM ini ada tambahan 1 pasal khusus terkait dengan evaluasi kemanfaatan. Sebelumnya Dasar pelaksanaan kerja tim evaluasi adalah KEPMENHUB No. KP. 48 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian

FGD dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan angkutan antarmoda yang terpadu dapat mewujudkan pelayanan perjalanan *single seamless services*, terpadu dalam hal pelayanan transportasi antarmoda (keterpaduan operasional), terpadu jaringan pelayanan transportasi antarmoda, dan terpadu jaringan prasarana dan sarana (keterpaduan secara fisik);
- b. Sistranas seharusnya dapat memayungi transportasi antarmoda/multimoda tetapi belum memiliki kepastian hukum. Dalam dokumen Sistranas sudah mendukung konsep mengenai keterpaduan antarmoda. Sistranas mengandung inti dari keterpaduan yaitu keterpaduan prasarana, jaringan pelayanan dan layanan. Keterpaduan tersebut harus diawali dengan perencanaan, terutama untuk di simpul. Sistranas belum dapat diimplementasikan karena kebijakan yang ada saat ini masih bersifat parsial dan belum sistemik dalam tingkatannya, walaupun telah diwacanakan menjadi undang-undang, namun hingga kini masih belum dapat diterbitkan;
- c. Dalam transportasi antarmoda/multimoda, yang perlu diharmonisasikan adalah keterpaduan jaringan, keterpaduan operasi, keterpaduan fungsi, keterpaduan kelembagaan, dan keterpaduan pembiayaan. Sedangkan untuk di tingkat teknis diperlukan NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria);
- d. Saat ini tiap sub sektor sudah menyusun rencana untuk sub sektornya masing-masing, namun belum diintegrasikan menjadi satu dalam rencana induk transportasi, karena terdapat permasalahan dalam manajemen, seperti koordinasi antara beberapa lembaga maupun antar sektor yang masih belum tersinergi dengan baik;
- e. Saat ini sebagian besar fasilitas antarmoda prasarana/ sarana transportasi dioperasikan “tidak” direncanakan dari awal dan masih berupa konsep “usulan”.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditindaklanjuti sebagai kesepakatan peserta diskusi, antara lain:
 - 1) Peraturan terkait keterpaduan transportasi, seperti undang-undang transportasi dan Sistranas, perlu ditinjau kembali;
 - 2) Kelembagaan yang menangani pembangunan dan penataan fasilitas alih moda, perlu dibentuk/ ditetapkan;
 - 3) Perlu penetapan standar keterpaduan transportasi, baik keterpaduan jaringan prasarana, keterpaduan jaringan pelayanan dan pelayanan;
 - 4) Perencanaan yang matang dalam pembangunan/penataan fasilitas alih moda di setiap simpul sangat diperlukan, dalam rangka mewujudkan keterpaduan transportasi.

FGD dilaksanakan pada tanggal 6 September 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Saat ini kebijakan yang ada hanya fokus pada 1 (satu) moda transportasi dan masih belum terkoneksi atau terintegrasi dengan moda lainnya;
- b. Terkait peraturan perundangan, logistik, dan Sistranas, karena mencakup multisektor diperlukan suatu badan khusus sebagai lembaga integrator;
- c. Terkait dengan arah kebijakan dalam membagi kewenangan. Selama ini kewenangan sudah dibagi namun yang kritis adalah peralihan masing-masing kewenangan;
- d. Secara perspektif logistik, ekspektasi/harapan di bidang logistik serta dukungan transportasi perlu diatur dalam RUU Sistranas atau diperlukan suatu regulasi atau undang-undang khusus seperti gagasan RUU Sistranas namun yang khusus mengenai logistik nasional atau integrasi nasional;
- e. Terkait infrastruktur, selama ini hanya mengenai hard infrastructure atau infrastruktur fisik. Sebaiknya juga menerapkan soft infrastructure sehingga dapat menghemat sebesar 30% berupa kecanggihan IT;
- f. Sebaiknya diperhatikan mengenai perencanaan pengembangan sistem transportasi nasional dan konteks pola pengawasan yang tepat di sektor transportasi.



**Pengembangan Sistem Transportasi Nasional
Dalam Mendukung Pelayanan Angkutan Barang
Yang Efisien
Jakarta, 13 Oktober 2017**

FGD dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Regulasi mengenai angkutan barang masih sedikit. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekitar 80% mengatur mengenai penumpang. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang proporsional antara angkutan penumpang dan barang;
- b. Salah satu permasalahan yang berkembang saat ini adalah mengenai tol laut, dimana kegiatan arus balik tidak berjalan dengan baik (banyak angkutan balik yang muatannya kosong);
- c. Perlu disegerakan terselesainya Undang-undang Sistranas sebagai legalisasi normatif dalam mengintegrasikan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan transportasi yang sudah ada serta acuan dalam pembagian peran dan tanggung jawab pihak yang terkait;
- d. Sistem perencanaan yang dilakukan setiap sub sektor masih kurang bersinergi, sehingga perlu dilakukan review pola perencanaan. Review disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter daerah baik untuk perencanaan pembangunan maupun pengembangan angkutan penumpang maupun barang;
- e. Penetapan sistem transportasi wilayah dengan melihat pada moda unggulan setiap wilayah karena tidak semua wilayah dapat dilayani oleh semua moda;
- f. Pengendalian serta pengawasan angkutan barang diharapkan ada di jembatan timbang. Namun operasional jembatan timbang sebelum Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hanya sebagai alat sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga data-data yang diharapkan tidak optimal;
- g. Pengendalian angkutan barang berkaitan dengan perizinan, oleh karena itu kebijakan mengenai perizinan angkutan barang dimunculkan kembali agar dapat melakukan pendataan mengenai barang yang diangkut, jaringan, dan lintasan angkutan barang dan agar dapat dijadikan bahan perencanaan ke depan;
- h. Sistranas diharapkan sebagai payung hukum yang dapat merangkum semua moda transportasi (darat, laut, udara dan kereta api). Dengan adanya Sistranas, maka beberapa regulasi di bidang transportasi perlu ditinjau kembali;
- i. Harga barang merupakan hasil dari spekulasi dan monopoli. Sebaiknya Bulog diberdayakan kembali;
- j. Pentingnya koordinasi mengenai Sistranas, banyak pihak (*stakeholder*) yang seharusnya dapat berperan serta dengan memberikan masukan untuk penyempurnaan Sistranas;
- k. Integrasi antarmoda di setiap simpul dapat dikembangkan; dan menciptakan transportasi yang efektif dan efisien dengan adanya transportasi yang terintegrasi.

FGD dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2017 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan FGD dengan tema "Pemberdayaan Pelayaran Rakyat dalam Menunjang Transportasi Laut".



Rekomendasi pemberdayaan pelayaran rakyat:

- 1) Perlu ada kebijakan pemerintah dalam mendorong pengguna jasa untuk melakukan pengapalan barang-barangnya pada kapal-kapal Pelra;
- 2) Perlu adanya kemitraan antara pengusaha Pelra dengan pengguna jasa yang saling menguntungkan, misalnya mengadakan kontrak jangka panjang;
- 3) Penataan jaringan secara keseluruhan terhadap sistem angkutan laut Indonesia sehingga Pelra memiliki pangsa pasar muatan, terutama untuk daerah pendalaman, terpencil dan terisolasi;
- 4) Perlu dikaji adanya alternatif bahan baku dan teknologi konstruksi kapal, yang selama ini terbuat dari kayu menjadi besi dan baja agar dapat diklasifikasikan. Dengan demikian pelayaran rakyat bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan dan dapat mengasuransikan keamanan muatan pada perusahaan asuransi;
- 5) Pemerintah membangun dermaga pada pelabuhan umum yang digunakan khusus untuk Pelra dengan tarif PNBP;
- 6) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap galangan kapal dan para pengrajin kapal Pelra;
- 7) Pemerintah memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan baik kepada pengusaha pelra maupun awak kapal.

Hasil FGD adalah sebagai berikut:

- a. Pelra masih menjadi salah satu bagian penting dalam penguatan konektivitas nasional untuk menjaga keseimbangan pembangunan nasional, sehingga pelra tetap diberdayakan meskipun perannya saat ini semakin berkurang.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi Pelra diantaranya adalah:
 - 1) Jaringan/trayek kapal Pelra semakin terbatas;
 - 2) Sulitnya mendapatkan kepastian muatan dan muatan balik (kapal harus menunggu 30-45 hari untuk mendapatkan muatan);
 - 3) Pelra sulit melakukan peremajaan kapal karena kurangnya ketersediaan bahan baku (kayu ulin);
 - 4) Sulit memperoleh bantuan permodalan dari perbankan dan asuransi karena kapal Pelra belum dapat diklasifikasikan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
 - 5) Ditinjau dari aspek prasarana, dermaga/pelabuhan khusus untuk Pelra kurang memadai. Di beberapa pelabuhan, alur pelayaran masuk pelabuhan sempit sehingga kapal Pelra sering kandas. Disamping itu, pelabuhan yang sebelumnya merupakan basis Pelra tersisihkan oleh kapal-kapal konvensional;
 - 6) Belum tersedianya galangan atau dock khusus bagi kapal Pelra yang terjangkau;
 - 7) Ditinjau dari aspek teknologi, kapal masih kurang modern karena kecepatan kapal yang rendah, ketersediaan navigasi dan alat komunikasi yang belum memadai serta alat keselamatan juga kurang memadai;
 - 8) Manajemen perusahaan Pelra masih bersifat kekeluargaan dan pada umumnya menggunakan sistem bagi hasil;
 - 9) Tingkat kompetensi pengusaha dan ABK Pelra masih rendah, misalnya persyaratan ijazah SMP untuk mendapatkan Basic Safety Training (BST) dan buku pelaut bagi ABK belum bisa dipenuhi.

FGD dilaksanakan pada tanggal 6 September 2017 di Hotel Grand Mercure Kemayoran

Hasil FGD adalah sebagai berikut

- a. Perwujudan Sistranas menjadi pedoman dalam pengaturan transportasi di Indonesia, sehingga diharapkan konsep Sistranas dapat segera disahkan oleh DPR mengingat Sistranas adalah induk dari UU transportasi yang sudah ada;
- b. Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan pada masing-masing tataran transportasi perlu memperhatikan aspek komersial dan keberintisan berdasarkan keunggulan moda sesuai dengan kondisi geografi, demografi, dan sumber daya alam;
- c. Sistranas merupakan suatu sistem dari prasarana dan sarana yang terwujud dalam berbagai moda transportasi, dan perlu didukung oleh teknologi dan informasi untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien;
- d. Permasalahan dalam sistem transportasi laut nasional saat ini adalah:
 - 1) Adanya ketimpangan tingkat pertumbuhan perekonomian antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia dan muatan masih terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI);
 - 2) *Load factor* armada nasional masih rendah karena tidak ada muatan balik dari Kawasan Timur Indonesia;
 - 3) Mahalnya biaya logistik nasional yang salah satunya terjadi karena pelayanan angkutan laut masih belum optimal;
 - 4) Perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan belum sesuai dengan rencana kapal yang akan dilayani di pelabuhan;
 - 5) Penegakan hukum di laut masih tumpang tindih;
 - 6) Masih rendahnya daya saing armada nasional karena tidak didukung oleh kebijakan fiskal, moneter dan *financing*;
 - 7) Koordinasi antar instansi yang memiliki kepentingan di pelabuhan masih bersifat ego sektoral.
- e. Rekomendasi untuk perbaikan sistem transportasi laut nasional adalah:
 - 1) Diperlukan upaya optimalisasi kerjasama antar sektor seperti perindustrian, pertanian, pertambangan, guna menyeimbangkan mata rantai jaringan logistik barat dan timur Indonesia;
 - 2) Perlu peningkatan infrastruktur pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia antara lain pengadaan peralatan bongkar muat sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pelabuhan lebih efisien;
 - 3) Pemerintah perlu memberikan insentif untuk mendorong pertumbuhan industri baru khususnya di wilayah timur Indonesia untuk menjamin muatan balik yang cukup (*balance cargo*);
 - 4) Program Tol Laut dan *Short Sea Shipping* sebagai upaya untuk mengurangi disparitas harga dan tingginya biaya logistik harus terkoneksi dengan moda lain dan perlu didukung oleh instansi lain yang terkait;
 - 5) Perlu dikembangkan *self generating port*, bagaimana pelabuhan bisa terintegrasi dengan kawasan industri, agar pelabuhan bisa *men-generate* muatan sendiri dan menyediakan muatan tepat waktu sehingga memberikan jaminan muatan pada kapal dan menurunkan biaya logistik;
 - 6) Perlu sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan;
 - 7) Perlu adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri pelayaran nasional baik dari segi fiskal dan moneter serta mendorong para operator kapal untuk mengoperasikan kapal-kapal yang lebih besar kapasitasnya melalui penyederhanaan regulasi dan penyediaan fasilitas kredit lunak;
 - 8) Diperlukan reformasi birokrasi dan perubahan pada struktur dan kultur dalam menciptakan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan;
 - 9) Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, koordinasi antar kelembagaan dan pembiayaan dengan melibatkan BUMN dan swasta diperlukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut yang efektif dan efisien.

FGD dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Oktober 2017
bertempat di Ruang Ballroom 2 Lantai 5 Harris Vertu Hotel Harmoni, Jakarta.



FGD “Peran Angkutan Sungai dan Danau dalam
Mendukung Angkutan Pedalaman”
Hotel Harris Vertue, Jakarta 31 Oktober 2017

Hasil FGD adalah sebagai berikut :

a. Peran angkutan sungai dan danau dalam mendukung angkutan pedalaman dapat ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Angkutan sungai dan danau sangat diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan aksesibilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk terutama di daerah pedalaman yang akses jalan masih sangat terbatas dan hanya mengandalkan angkutan sungai dan danau;
- 2) Potensi sungai untuk transportasi yang terdapat pada 15 provinsi di Indonesia sebanyak 500 sungai, dan baru 214 sungai yang dimanfaatkan namun belum optimal dengan panjang sekitar 23.255 km. Sedangkan potensi danau pada 14 provinsi di Indonesia sejumlah 23 dengan luas yang semakin berkurang semula 4.287 km² menjadi 3.737 km²;
- 3) Pada umumnya angkutan sungai dan danau ditinjau dari aspek keselamatan masih rendah sehingga perlu adanya perhatian khusus secara berkelanjutan oleh pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam rangka mendukung angkutan pedalaman yang berkeselamatan dengan memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan, antara lain ukuran kapal, karakteristik perairan, kecepatan kapal, dan fasilitas peralatan keselamatan.

- 1) Agar dilakukan penanganan fungsi regulator yang lebih terstruktur oleh pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah atau integrasi lintas sektoral;
- 2) Perlu ada pembinaan dan pengendalian dari Ditjen Perhubungan Darat terhadap Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk penanganan angkutan sungai dan danau;
- 3) Perlu ada *mapping* sungai dan danau seluruh Indonesia yang disesuaikan dengan struktur tanah, sehingga terjadinya abrasi dapat diperhitungkan dengan baik yang bertujuan supaya sungai dan danau dapat digunakan sepanjang tahun;
- 4) Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif mengenai pentingnya aspek keselamatan dalam penggunaan alat keselamatan pelayaran terhadap penumpang kapal;
- 5) Perlunya *pilot project* dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam pengembangan angkutan sungai dan danau seperti yang telah dilakukan pada tahun 2017 di kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata dan diharapkan dapat berlanjut ke sungai dan danau di daerah-daerah lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan juga. Sebagai contoh Sungai Erau di Kalimantan Timur dan Danau Sentani di Papua;
- 6) Perlu mengacu kepada *Non Convention Vessel Standard* (NCVS) atau Standar Kapal Non Konvensi untuk keselamatan kapal GT <500, dan perlunya evaluasi kembali terhadap ketentuan yang memberatkan sepanjang tidak mengurangi dari aspek keselamatan;
- 7) Perlu mengacu kepada Permenhub Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau guna menjamin ketertiban lalu lintas kapal, memonitor pergerakan kapal dan mengarahkan kapal di alur sungai dan danau;
- 8) Pada tahun 2018, sungai dan danau di Indonesia perlu dimasukkan dalam *political will* dan *political action* pemerintah seperti Rencana Strategis Nasional dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dengan mengidentifikasi kebutuhan pelayaran kapal di sungai dan danau, yang selama ini belum tertangani secara serius.

FGD dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017 di Ruang Lotus 1 *Grand Mercure* Kemayoran

Hasil FGD sebagai berikut:

- Tol Laut merupakan konektivitas angkutan laut yang efektif dengan menyediakan sarana yang terjadwal secara reguler, tetapi jadwal kapal Tol Laut belum terintegrasi dengan kapal ASDP dan kapal perintis.
- Masalah utama di transportasi laut adalah masalah efisiensi, yang bersumber pada aspek *economy of scale* dan penerapan teknologi. *Economy of scale* lebih pada masalah kapasitas kapal dan ketersediaan infrastruktur. Sedangkan dari sisi teknologi adalah teknologi perkapalan yang berdampak pada peningkatan kecepatan, ketahanan kapal terhadap iklim serta teknologi alat bongkar muat serta penerapan IT dalam pelayanan jasa kepelabuhanan. Dengan demikian perlu dilakukan analisis biaya terhadap kapal Tol Laut dan trayek dengan konsep *economy of scale*.
- Pelayaran rakyat berperan dalam mendukung kelancaran program Tol Laut agar dapat menjangkau wilayah terpencil, tertinggal dan terluar karena kapal Tol Laut saat ini belum menyinggahi wilayah pelosok.

FGD “Design Kapal *Feeder* Untuk Mendukung Pelayanan Tol Laut di Wilayah Maluku Utara”
Jakarta 22 November 2017



- Kapal *feeder* menjadi salah satu alternatif untuk sarana mendistribusikan kebutuhan barang pokok di wilayah Maluku Utara. Kapal LCT dengan ukuran 45 meter, lebar 10, tinggi 3,5 dan sarat 2,5 meter dan bobot mati 500 DWT serta kecepatan 8 knot diusulkan sebagai kapal *feeder* kapal program Tol Laut.
- Perlu kerjasama yang sinergis antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengupayakan ketersediaan sarana angkutan laut di wilayah Maluku Utara.
- Subsidi baru diberikan untuk kapal Tol Laut dan diharapkan ke depan subsidi ini juga diberikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui ASDP sebagai *feeder* dari kapal Tol Laut.
- Perlu ditentukan rute yang paling optimal dari program Tol Laut ini dengan simulasi yang pas, seperti penggunaan TSP (*Travelling Salesman Problem*) untuk konsep *multiport*, sehingga akan diperoleh satu *round trip* yang paling efisien.
- Desain yang telah dibuat perlu dipertimbangkan kembali untuk mesin kapal, posisi titik berat (baik kapal kosong maupun kapal ketika dimuat) dan bentuk badan kapal ketika berada di bawah garis air. Teknik perkapalan ITS siap membantu melakukan *review* dari desain ini sebelum desain akan dibuat prototipe-nya untuk dipasarkan.

FGD dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 dengan beberapa hasil rekomendasi sebagai berikut:

- a. Maskapai diminta untuk serius dalam mengimplementasikan prosedur yang tertuang dalam *Company Operation Manual* (COM), *Company Maintenance Manual* (CMM), dan *Safety Management System* (SMS).
- b. Melaksanakan *simulator training* dengan *database* yang *updated* yang sesuai dengan daerah operasi pilot dan jika beroperasi di Papua maka pilot dipersyaratkan melaksanakan *mountainous flying training*.
- c. Operator penerbangan diwajibkan mengoperasikan pesawat udara disesuaikan dengan fasilitas dan spesifikasi teknis operasional bandar udara mengingat sering terjadinya *runway excursion*.
- d. Pengelola bandar udara agar *comply* terhadap CASR 139 dalam hal inspeksi dan perawatan *runway* (*rubber deposit removal*, *overlay* tepat waktu, *overlay weakspots*, dan monitoring *foreign object debris*).
- e. Pengelola bandar udara, khususnya BUBU *holder*, harus memiliki alat MuMeter untuk mengukur kekesatan runway (*skid resistance*) yang mengacu kepada peraturan KP 94 tahun 2015 tentang Pedoman Program Pemeliharaan Konstruksi Perkerasan Bandar Udara (*Pavement Management Sytem*), sehingga tidak ada alasan untuk mengundurkan jadwal hingga melebihi jatuh tempo pengukuran kekesatan *runway* karena menunggu giliran pemeriksaan oleh Balai Teknik Penerbangan (saat ini instansi yang memiliki alat MuMeter hanya Balai Teknik Penerbangan).
- f. Seluruh bandar udara diberikan tugas untuk memberikan informasi ketinggian air di permukaan *runway* secara *real time* yang diteruskan ke ATC dan selanjutnya dinformasikan kepada pilot. Hal ini bertujuan agar pilot dapat melakukan *landing distance calculation* pada *wet runway*. Selain itu, diperlukan alat pengukur ketinggian air (*standing water*) di permukaan runway mengingat Indonesia merupakan negara dengan curah hujan yang tinggi.
- g. Mempertimbangkan prosedur penutupan bandar udara oleh pengelola bandar udara pada saat *limit* telah dibawah minimal (*visibility* dan *weather*) sehingga tidak ada pilot yang mencoba-coba untuk mendarat pada kondisi tersebut.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lapangan terbang (*airstrip*) yang pengoperasiannya belum sesuai dengan standar kebandarudaraan, serta dipersyaratkan ada personel kebandarudaraan di seluruh *airstrip* tersebut.
- j. Dalam waktu dekat melakukan pengadaan peralatan navigasi yang sesuai standar di daerah Indonesia bagian timur, seperti ILS, ADS-B, NDB, VOR, dan DME, mengingat jumlah peralatan navigasi di lokasi tersebut masih kurang.
- k. Pengelola lalu lintas udara diminta untuk menyediakan prosedur khusus (PBN) di ruang udara Papua.
- l. Untuk pesawat udara yang beroperasi di daerah *mountainous area*, khususnya untuk pesawat kecil (*normal category*) perlu dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang memadai mengingat alat komunikasi HF tidak efektif bahkan lebih berfungsi peralatan komunikasi SSB. Dalam hal ini dapat diijinkan untuk jangka waktu tertentu menggunakan alat komunikasi SSB.
- m. Melakukan pemutakhiran informasi cuaca dalam mendukung pengoperasian pesawat udara di Papua mengingat cuaca di daerah tersebut rentan perubahan. Selain itu, diperlukan penambahan stasiun meteorologi (BMKG) di wilayah Papua.
- n. Melakukan penambahan pembangunan infrastruktur listrik dan jaringan IT guna meningkatkan performa stasiun meteorologi dalam hal penyediaan informasi cuaca.
- o. Menyediakan peralatan *windshear detector* mengingat banyaknya bandar udara yang berada di wilayah pegunungan.
- p. Harus dibuat mekanisme pengawasan dan diimplementasikan secara berkesinambungan terhadap keselamatan penerbangan (*safety oversight*).
- q. Memperkuat peran Otoritas Bandar Udara untuk pengawasan dengan menambah jumlah *inspector* penerbangan dan dilakukan *upgrading training* yang saat ini dinilai masih sangat kurang.
- r. Melakukan pemantauan langsung (*on-duty*) oleh pihak *management* maskapai ke wilayah *out-stationnya* secara *random* dan bergantian sebagai *shock therapy* jangka pendek, khususnya ke wilayah Papua yang sangat rentan dengan kejadian.
- s. Wajib mengimplementasikan regulasi secara konsisten untuk semua pemegang AOC, OC, dan PSC 141.
- t. Menerbitkan pengaturan tersendiri (*specific regulations*) untuk dipergunakan dalam operasi penerbangan di Papua.
- u. Sangat diperlukannya kerja sama antara *inspector* Kelaikudaraan Dan Pengoperasian Pesawat Udara dan *inspector* Otoritas Bandar Udara di wilayah Indonesia bagian timur (OBU Wilayah IX dan X) untuk melakukan *surveillance* dan inspeksi kelaikan udara di Papua secara berkesinambungan guna mencegah terjadinya kecelakaan penerbangan.

FGD Dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 di Fave Hotel, Papua dengan beberapa hasil butir-butir diskusi sebagai berikut:

- g. Upaya Pemerintah untuk mengurangi disparitas harga di wilayah Papua dilakukan dengan menyambungkan pola distribusi logistik yang berasal dari tol laut ke jembatan udara.
 - h. Implementasi jembatan udara adalah menghubungkan dari bandar udara hub (pengumpul) ke bandar udara spoke (pengumpan) termasuk airstrip.
 - i. Untuk mengefektifkan distribusi logistik dengan mempercepat penurunan disparitas harga adalah jika dermaga/pelabuhan laut letaknya berdekatan dengan bandar udara, atau diperlukan aksesibilitas (fasilitas/infrastruktur jalan) yang memadai untuk menghubungkan pelabuhan laut menuju bandar udara.
 - j. Penentuan bandar udara hub (pengumpul) dan bandar udara spoke (pengumpan) di Papua sangat penting dilakukan untuk menjamin bahwa distribusi logistik ke daerah pedalaman/ pegunungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
 - k. Adanya usulan pembangunan Rumah Kita (gudang penampungan / gudang kargo) beserta fasilitas pendukungnya di bandar udara hub dan bandar udara spoke.
 - l. Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, sehingga sebagai tindak lanjut teknisnya perlu ada regulasi berupa Peraturan Menteri dari Kementerian Perdagangan yang mengatur penentuan harga barang logistik di Indonesia Bagian Timur, khususnya di Papua dan Papua Barat, termasuk jenis barang logistik/komoditas yang diangkut serta pendistribusiannya.
 - m. Perlu adanya kelembagaan yang berfungsi untuk pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bandar udara hub/spoke, dengan dibuat SOP sebagai mekanisme tatakelola harga barang logistik di Papua, dengan diberi kewenangan setingkat eselon II.
- a. Dengan adanya tuntutan pengoperasian pesawat udara berkapasitas angkut barang logistik/kargo lebih besar, sehingga diperlukan pengembangan/perpanjangan landas pacu (runway) bandar udara, mengingat harga angkutan udara barang logistik/ kargo dihitung berdasarkan berat per kilometer.
 - b. Sehubungan dengan kepadatan lalu lintas penerbangan di Papua maka perlu diimbangi dengan peningkatan penyediaan fasilitas alat bantu navigasi penerbangan untuk menunjang aspek keselamatan penerbangan.
 - c. Guna penurunan harga sewa (charter) pesawat, diupayakan agar pengoperasian pesawat udara logistik/kargo dapat membawa muatan balik berupa hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan handycraft yang sekaligus mendorong peningkatan potensi daerah.
 - d. Program jembatan udara dengan angkutan perintis kargo akan berjalan pada akhir tahun 2017, antara lain subsidi angkutan perintis kargo dengan melayani 3 (tiga) bandar udara hub dan 12 (dua belas) bandar udara spoke di Provinsi Papua, menggunakan pesawat udara tipe freighter Boeing 737 series untuk bandar udara hub, dan menggunakan pesawat udara tipe DHC-6 Twin Otter dan Grand Caravan untuk bandar udara spoke.
 - e. Dari hasil diskusi didapatkan masukan agar Bandar Udara Moses Kilangin-Timika, Bandar Udara Mopah-Merauke dan Bandar Udara Douw Aturure-Nabire diusulkan sebagai bandar udara hub (pengumpul) untuk angkutan kargo/logistik udara di Provinsi Papua karena letaknya yang berdekatan dengan pelabuhan tol laut (Timika – Merauke – Nabire).
 - f. Kesyambungan angkutan kargo/logistik dari tol laut dengan jembatan udara di Provinsi Papua memerlukan sinergi antar instansi, yaitu Kementerian Perhubungan (melalui Kantor Otoritas Bandar Udara, Kabandara dan Dinas Perhubungan), Kementerian Perdagangan (melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Sosial), serta Pemda Provinsi Papua dan Kabupaten terkait, sehingga terwujudnya penurunan harga.

FGD dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017 dengan beberapa hasil rekomendasi sebagai berikut:

- a. BLU bukan merupakan penjenjangan bagi UPBU untuk melangkah menjadi BUMN, karena secara kelembagaan sangat berbeda seperti dalam orientasi profit, sifat pendapatan, karakteristik layanan, status asset dan status obyek pajak, sehingga apabila akan dialihkan menjadi BUMN status BLU harus ditanggalkan dan memerlukan tahapan proses pengalihan asset.
- b. Dalam upaya mengoptimalkan pola BLU masih diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan penerapan BLU bandar udara, salah satunya dengan merubah mindset dalam pola manajemen BLU dari pola birokrat menjadi pola enterpreuner sehingga lebih profesional di bidangnya. Pola kerjasama pada BLU bandar udara dengan pihak lain sangat tergantung pada kebutuhan BLU tersebut, dalam mengembangkan potensi ekonomi (peluang bisnis) bandar udara.
- c. Untuk meningkatkan kinerja BLU bandar udara dapat dilakukan kerja sama pelayanan jasa penunjang dengan pihak lain dengan menggunakan pola Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM), meskipun KSO dan KSM hanya terbatas pada lini bisnis penunjang, tetapi BLU dapat memperoleh *transfer of knowledge* dari mitra kerja sama (misal BUMN/Swasta) sehingga akan dapat meningkatkan daya saing. Selain bentuk pola kerjasama KSO/KSM, penyediaan insfrastruktur pada layanan transportasi udara dapat juga dilakukan dengan pola Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
- d. Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dapat dilakukan pada UPBU lainnya yang mempunyai potensi, dengan skema tersebut diharapkan percepatan penyediaan layanan infrastruktur bandar udara dapat segera tercapai. Namun demikian perlu adanya aturan yang jelas mengenai pola kerjasama / kemitraan antara BLU bandar udara dengan pihak lainnya tersebut, sehingga terdapat batasan yang jelas dalam hal manfaat yang diperoleh dan risiko yang ditanggung.

C.

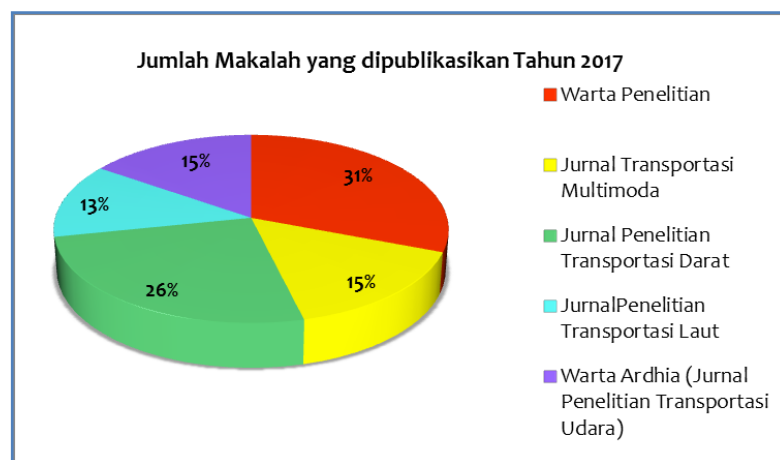
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

Warta Penelitian Perhubungan merupakan wadah publikasi ilmiah Badan Litbang Perhubungan dikelola oleh Sekretariat Badan Litbang Perhubungan yang terbit setiap 6 (enam) bulan sekali. Warta Penelitian memuat hasil-hasil penelitian bidang transportasi dari para peneliti Badan Litbang Perhubungan dan para peneliti dari instansi lain yang terkait.

Jurnal Penelitian merupakan wadah publikasi ilmiah Badan Litbang Perhubungan yang dikelola oleh masing-masing Puslitbang. Jurnal rata-rata diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dengan memuat rata-rata 5 makalah setiap terbit.

Sebagai bentuk apresiasi dan sosialisasi terhadap hasil-hasil penelitian, Badan Litbang Perhubungan telah mempublikasikan melalui Warta Penelitian dan Jurnal. Penerbitan ini dengan maksud agar hasil penelitian dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh para pengguna jasa penelitian dan dalam rangka saling tukar menukar informasi.

No	Publikasi	Jumlah Penerbitan	Jumlah Makalah
1.	Warta Penelitian	2	24
2.	Jurnal Transportasi Multimoda	2	12
3.	Jurnal Penelitian Transportasi Darat	4	20
4.	Jurnal Penelitian Transportasi Laut	2	10
5.	Warta Ardhia (Jurnal Penelitian Transportasi Udara)	2	12



Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2018

Selain publikasi yang ada di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, peneliti Badan Litbang juga mempublikasikan tulisannya di jurnal-jurnal internasional. Tabel di bawah ini memaparkan penelitian yang dipublikasikan di tingkat internasional pada tahun 2017.

Publikasi Makalah Internasional Tahun 2017

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PUBLIKASI INTL	EDISI PENERBITAN
Siti Maimunah	<i>Spatial Econometric Analysis of Automobile and Motorcycle Traffic on Indonesian National Roads and Its Socio-Economic Determinants: Is It Local or Beyond City Boundaries?</i>	<i>Internasional Association of Traffic and Society Sciences (IATSS) Research</i>	IATSSR-0155, No of pages : 10
Reslyana Dwitasari	<i>Analyzing Commuters Behavior on Egress Trip From Railway Station in Yogyakarta, Indonesia</i>	<i>The Open Transportation Journal</i>	ISSN: 1874-4478- Volume 12, 2018

BAB IV

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN TEKNIS DAN LAINNYA



1. PERENCANAAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Kegiatan perencanaan kebijakan di sektor transportasi dilatarbelakangi oleh permintaan atau usulan daerah terkait perencanaan pembangunan dan pengembangan transportasi di suatu wilayah (kabupaten). Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyusunan Studi Tataran Transportasi Lokal yang dikerjakan secara swakelola dan melibatkan tenaga ahli serta daerah terkait.

Pada tahun 2017, pelaksanaan perencanaan kebijakan transportasi dilakukan di dua wilayah yaitu Studi Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Boven Digoel dan Studi Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Minahasa Selatan.

2. RENCANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Litbang Perhubungan telah menyusun kegiatan penelitian yang dibiayai dari anggaran tahun 2018 sebagai berikut:

a. Kegiatan Pokok

No.	Unit Kerja	Anggaran 2018 (Rp. 000,-)
1.	Setbadan Litbang	50.003.832
2.	Puslitbang Transportasi Antarmoda	26.807.107
3.	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	21.649.019
4.	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	22.348.059
5.	Puslitbang Transportasi Udara	23.022.889
Jumlah		143.830.906

Anggaran Tahun 2018

Sumber : Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Januari 2018

3. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan				
		SMP s.d D3	D4/S1	S2	S3	Jumlah
1.	Setbadan Litbang	18	12	22	2	54
2.	Puslitbang Transportasi Antarmoda	4	4	16	2	26
3.	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	5	16	23	-	43
4.	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	6	9	14	3	32
5.	Puslitbang Transportasi Udara	6	12	15	2	35
Jumlah		39	53	90	9	190

Sumber: Kepegawaian Badan Litbang Perhubungan, Januari 2018

Analisis Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Pelaksana dan Jabatan Pelaksana Berdasarkan Analisis Beban Kerja

Unit Kerja	ABK	Jumlah Eksisting	Kekurangan Pegawai
Sekretariat Badan Litbang Phb	179	26	153
Puslitbang Transportasi Antarmoda	130	31	99
Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	204	50	154
Puslitbang Transportasi Laut, SDP	155	31	124
Puslitbang Transportasi Udara	153	35	118
Jumlah	821	173	648

Sumber: Kepegawaian Badan Litbang Perhubungan, Januari 2018

Peneliti berdasarkan Jenjang Jabatan dan Unit Kerja serta Analisis Beban Kerja

No	Jenjang Peneliti	Puslitbang Transportasi Antarmoda		Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian		Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Puslitbang Transportasi Udara	
		Eksisting	ABK	Eksisting	ABK	Eksisting	ABK	Eksisting	ABK
1.	Peneliti Utama	0	4	0	15	0	11	0	4
2.	Peneliti Madya	6	12	12	25	9	18	7	18
3.	Peneliti Muda	10	16	7	35	3	18	8	18
4.	Peneliti Pertama	6	24	19	45	10	18	9	28
Jumlah		22	56	38	120	22	65	24	68

Sumber: Kepegawaian Badan Litbang Perhubungan, Januari 2018

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan peneliti di Badan Litbang saat ini sebanyak 309 orang. Jumlah ini tiga kali lipat dari jumlah sumber daya peneliti yang ada saat ini, yaitu 106 orang.

Satya Lencana	Penerima Penghargaan (orang)	Penerima Penghargaan Satya Lencana
a. XXX	2	
b. XX	5	

4. BIDANG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

a. Laporan Keuangan

1) Pagu

Pada tahun 2017, perolehan pagu anggaran awal Badan Litbang Perhubungan adalah sebesar Rp 124.163.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp 116.194.498.000,-, dengan rincian jenis belanja pada tabel berikut:

Pagu Anggaran Per-Jenis Belanja Tahun 2017
Badan Litbang Perhubungan

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	40.005.800.000	40.005.800.000
Belanja Barang	82.780.144.000	73.966.228.000
Belanja Modal	1.377.056.000	2.222.470.000
Total	124.163.000.000	116.194.498.000

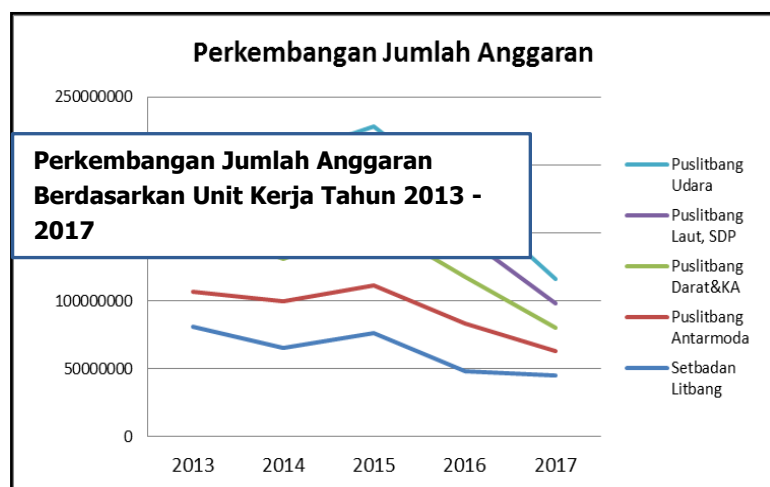
Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Litbang Perhubungan, 2017

Berdasarkan data perkembangan pagu anggaran Badan Litbang Perhubungan selama lima tahun terakhir, terlihat pagu anggaran cenderung mengalami penurunan. Penurunan pagu paling tinggi terjadi di tahun 2016 sebesar 29% dibandingkan tahun 2015 bersamaan dengan berkurangnya jumlah peneliti sebesar 20%. Selanjutnya pagu anggaran awal tahun 2017, yaitu Rp 124.163.000.000,- kembali berkurang sebesar 30% dibandingkan pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp 176.406.427.000,-. Kondisi menurunnya pagu anggaran tersebut digambarkan pada tabel dan gambar di bawah ini:

Perkembangan Pagu Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2013-2017

NO	UNIT KERJA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Setbadan Litbang	81.090.093	65.269.534	76.347.530	48.320.175	45.298.345
2.	Puslitbang Transportasi Antarmoda	25.525.576	34.239.300	34.768.386	35.310.700	18.022.340
3.	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	49.728.245	31.415.758	46.166.127	33.753.378	16.768.940
4.	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	31.295.729	22.508.589	32.257.400	30.065.803	18.366.131
5.	Puslitbang Transportasi Udara	33.658.362	52.284.530	38.719.657	28.956.371	17.738.742
JUMLAH		221.298.005	205.717.711	228.259.100	176.406.427	116.194.498

Sumber : Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Januari 2018



2) Realisasi

Berdasarkan data realisasi anggaran, yaitu anggaran revisi tahun 2017 dengan pagu Rp 116.194.498.000,- terealisasi sebesar Rp 97.137.904.761,- (83,6%).

Apabila melihat realisasi anggaran belanja Badan Litbang Perhubungan, sisa anggaran yang tidak terserap di tahun 2017 sekitar 16,4% (Rp. 19 miliar) dari pagu revisi total. Berdasarkan besaran sisa anggaran tercatat 72% berasal dari belanja pegawai, selanjutnya 28% berasal dari sisa belanja barang dan 0,34% berasal dari sisa belanja modal.



b. Laporan Perlengkapan

Laporan perlengkapan mencakup informasi terkait sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan di Badan Litbang Perhubungan, seperti:

1) Komputer

Pada tahun 2017 terdapat penghapusan beberapa *PC*, *notebook*, dan *laptop* sebagai aset Badan Litbang Perhubungan disebabkan oleh kondisi yang tidak layak pakai.

Perkembangan jumlah Komputer

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH KOMPUTER-TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Setbadan Litbang	168	190	59
2.	Puslitbang Transportasi Antarmoda	60	60	93
3.	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	92	107	67
4.	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	39	63	72
5.	Puslitbang Transportasi Udara	60	65	99
JUMLAH		419	485	390

Sumber : Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Januari 2018

2) Ruang

Luas Ruang Terhadap Jumlah Pegawai

NO	UNIT KERJA	LUAS RUANGAN (M ²)
1	Setbadan Litbang	2.570
2	Puslitbang Transportasi Antarmoda	420
3	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	1.236
4	Puslitbang Transportasi Laut	420
5	Puslitbang Transportasi Udara	420
Jumlah		5.066

Sumber : Data diolah, Januari 2018

3) Peralatan Survei

Dalam pelaksanaan survey primer, dibutuhkan beberapa alat survei yang bertujuan untuk mendapatkan hasil pengamatan dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Beberapa alat survei yang dimiliki Badan Litbang Perhubungan dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Jenis Peralatan Survei	Jumlah (Unit)	No.	Jenis Peralatan Survei	Jumlah (Unit)
1.	<i>Drone</i>	7		Alat Laboratorium	2
2.	<i>Digital Tachometer</i>	10	15.	Kebisingan dan Getaran Lainnya	
3.	<i>Speed Gun</i>	15	16.	Alat Uji Audit System (<i>Hawk Eye 1000</i>)	1
4.	Mobil + <i>Hawkeyes</i>	1	17.	Alat Uji System (ARRB)	1
5.	<i>Traffic Counter</i>	28	18.	Alat Pendeteksi Dini Longsoran Jalur Kereta Api	1
6.	Jembatan Timbang <i>Portable</i>	1	19.	Echo Sounding	1
7.	Alat Penguji Kendaraan Bermotor Lainnya	1	20.	Miniatur Perlintasan Sebidang	1
8.	Alat Ukur Lainnya (TAC)	1	21.	<i>Handy Talky</i>	6
9.	<i>Theodolite</i>	2	22.	Kamera Digital	2
10.	<i>Surveillance</i>	2	23.	Kamera Video	1
11.	<i>Triaxal CBR</i>	2	24.	Radio Transmitter	3
12.	Alat Uji Gas Buang	2			
13.	Hammer Test				
14.	Alat Uji Emisi Bergerak	2			



Peralatan Survei Badan Litbang Perhubungan

4) Software Pengolahan Data

Keuntungan penggunaan *software* dalam pengolahan data dapat meminimalkan kebutuhan tenaga manusia. Selain itu, pengolahan data menggunakan *software* dapat memproses data dalam jumlah yang lebih besar dengan tingkat keakuratan yang tinggi serta kecepatan yang lebih besar.

Software Pengolahan Data		
No.	Software	Jumlah (license)
1.	Omnitrans V.1.6	2
2.	Transcad	1
3.	VISSUM	1
4.	VISSIM V.9	2
5.	VISWALK	1
6.	Tableau	1
7.	Expert Choice	1
8.	Matlab	1
9.	Autocad	1
10.	Map Info Pro V.15	1
11.	Data Acquisition and Analysis System	1

Sumber: Data diolah, Januari 2018

5. BIDANG HUKUM

Salah satu peran Badan Litbang Perhubungan adalah melakukan penyusunan naskah akademis terkait dokumen peraturan. Pada tahun 2017, produk Badan Litbang Perhubungan di bidang hukum yaitu Naskah Akademis RUU Sistranas.

Kegiatan penyusunan ini merupakan tindak lanjut dari RDP Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR RI tanggal 19 Juli 2017, bahwa komisi V DPR RI bersama Sekretariat Jenderal dan Badan Litbang Perhubungan sepakat untuk mendukung penyusunan naskah akademis RUU Sistranas yang menjadi inisiatif DPR. Instansi yang terkait dalam penyusunan naskah akademis RUU Sistranas yaitu Kementerian Perhubungan, kementerian terkait, akademisi, LSM, operator transportasi / BUMN, asosiasi atau organisasi bidang transportasi. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahun 2018 dalam rangka pematapan penyusunan

6. BIDANG KERJA SAMA

Perkembangan tantangan dan kendala yang dihadapi sektor transportasi akhir-akhir ini semakin besar ditambah dengan adanya tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, Badan Litbang Perhubungan sebagai institusi penelitian dituntut mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat dengan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan mudah diaplikasikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kerja sama penelitian dengan pihak lain ditunjang dengan sumber daya yang ada, serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Jejaring kerja sama yang terbentuk di tahun 2017 dengan 6 (enam) lembaga terdiri dari 3 (tiga) Perguruan Tinggi, 1 (satu) Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan 2 (dua) Pemerintah Daerah Kabupaten. Secara rinci keenam lembaga/ instansi tersebut adalah:

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Minahasa Selatan

Kerja sama penelitian dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Minahasa Selatan merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), untuk terciptanya sinkronisasi, sinergitas kebijakan dan perwujudan konektivitas serta keterpaduan jaringan prasarana dan sarana transportasi di simpul transportasi dalam perencanaan sistem transportasi baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan sektor lainnya diperlukan dokumen perencanaan berupa Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) untuk Propinsi dan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) untuk Kabupaten/Kota.

Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Minahasa Selatan telah mengajukan permohonan bantuan teknis penyusunan dokumen Tatralok sesuai surat nomor No.550/135/Dishub/2015 tanggal 27 November 2015 dan surat nomor No.458/sekr/III-2015 tanggal 23 Maret 2015. Kesepakatan bersama antara Badan Litbang Perhubungan dan kedua kabupaten dimaksud dilakukan pada tanggal 28 Februari 2017 dengan tujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mendayagunakan sumberdaya dan peneliti, dalam penyusunan dokumen perencanaan transportasi di Kabupaten Boven Digoel dan Minahasa Selatan.

Kesepakatan ini dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Badan Litbang dengan Kabupaten Boven Digoel No. KL.206/1/2-BLT-2017 dan No. 180/259/BUP/2017 dan Surat Kesepakatan Bersama Antara Badan Litbang dengan Kabupaten Minahasa Selatan No. KL. 206/1/1-BLT-2017 dan No. 09/MOU/BMS/11-2017.

b. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Kesepakatan ini dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Dengan Pusat Studi Transportasi Dan Logistik Universitas Gadjah Mada No. KL.206/I/6-BLT-2017 dan No. 050.139/UGM/P/III/2017. c. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kesepakatan ini dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) No. KL.206/1/9-BLT-2017 dan No. 13A/PKS/BPPT-Litbang TU Kemhub/03/2017. d. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung Kesepakatan ini dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung No. KL.206/1/5-BLT-2017 dan No. 1322/I1.C08/DN/2017. e. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kesepakatan ini dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Dengan Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) No. KL.206/1/8-BLT-2017.	9 (sembilan) kegiatan penelitian kerja sama Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2017 yaitu: a. Penelitian kerja sama dengan BPPT di bidang transportasi laut, yaitu Penelitian <i>Basic Design</i> dan <i>Keyplan</i> Kapal Feeder; b. Penelitian kerja sama dengan Direktorat Angkutan Udara dan BPPT, yaitu Kajian Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo di Provinsi Papua; c. Penelitian kerja sama dengan ITB dibidang transportasi jalan, yaitu Uji Simulasi <i>Crashworthiness</i> pada Desain Rancang Bangun Karoseri Kendaraan Angkutan Penumpang di Indonesia; d. Penelitian kerja sama dengan UGM dibidang transportasi jalan, yaitu Pengembangan Jaringan Jalan untuk Kebutuhan Mobilitas Angkutan Barang Berdasarkan Hasil Survei ATTN; e. Penelitian kerja sama dengan UNHAS dibidang transportasi laut, yaitu Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau; f. Penelitian kerja sama dengan UNHAS dibidang transportasi laut, yaitu Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Danau Onan Runggu, Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara; g. Penelitian kerja sama dengan UNHAS dibidang transportasi laut, yaitu Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Danau Sippinggan, Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara; h. Penelitian kerja sama dengan UNHAS dibidang transportasi laut, yaitu Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Sungai Durian Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat; i. Penelitian kerja sama dengan UNHAS dibidang transportasi laut, yaitu Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sabu Raijua, NTT; j. Penelitian kerja sama dengan UNHAS di bidang transportasi laut, yaitu Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Laut Wosu Kabupaten Morowali Utara , Sulawesi Tengah.
---	---

7. PERPUSTAKAAN

Seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Perhubungan dikelola oleh Bagian Perpustakaan Badan Litbang Perhubungan untuk dapat digunakan oleh masyarakat umum. Perpustakaan Badan Litbang bersifat terbuka, dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Pada tahun 2017 tercatat jumlah dokumen yang diunduh sebanyak 690 laporan dan jumlah hasil penelitian yang dipinjam sebanyak 185 laporan. Berikut perkembangan koleksi buku atau literatur yang tersedia di Perpustakaan Badan Litbang selama lima tahun.

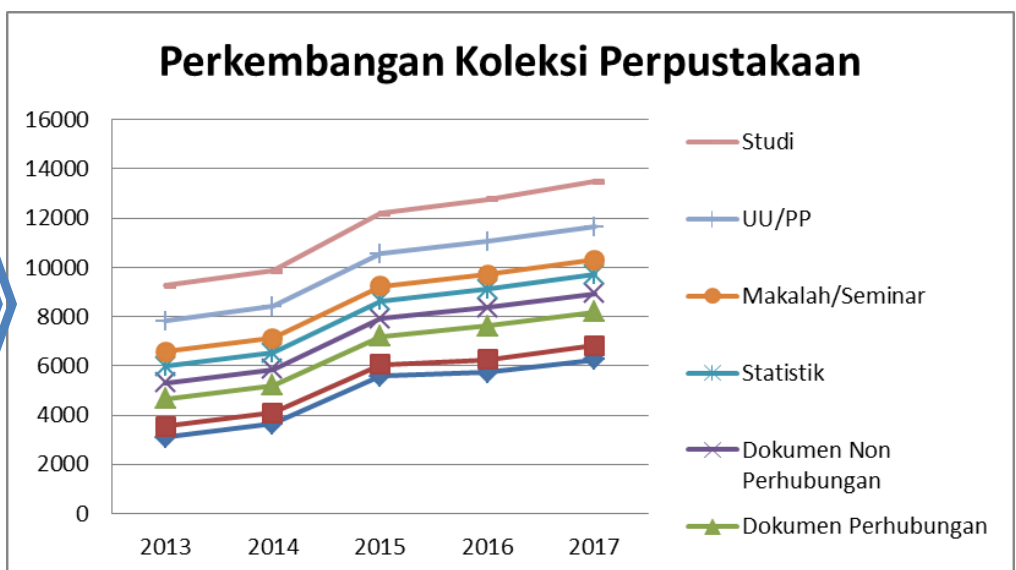
Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan, Badan Litbang Perhubungan dilengkapi dengan perpustakaan yang secara kuantitatif memiliki beberapa koleksi literatur.

	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Studi	3104	3651	5.592	5.740	6.243
UU/PP	429	429	452	512	573
Makalah/Seminar	1124	1124	1.163	1.369	1.371
Statistik	653	653	698	742	742
Dokumen Non Perhubungan	679	679	725	751	765
Dokumen Perhubungan	596	596	596	596	598
	1238	1289	1.330	1.330	1.363
	1435	1435	1.648	1.717	1.821
Jumlah	9258	9856	12.204	12.757	13.476

Daftar Koleksi Perpustakaan

Perkembangan Koleksi Perpustakaan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2013 - 2017

Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2018



BAB V

KEGIATAN LAINNYA



LOMBA PENELITIAN



Penyerahan Hadiah dan Penghargaan kepada Pemenang Lomba Penelitian Transportasi Tingkat Nasional Jakarta, 26 Oktober 2017

Pemenang Peringkat I Tingkat Nasional mendapatkan penghargaan Cipta Tata Wahana Nusantara Award dari Menteri Perhubungan. Selain itu, bersama dengan peringkat II dan III Nasional telah mengikuti *Transport Education Trip* ke Beijing pada tanggal 25 - 30 November 2017.



Pemaparan Makalah "Purwarupa Pintu Perlindungan Kereta Api Otomatis Untuk Mencegah Kecelakaan di Perlindungan Sebidang" oleh Meyer E. Sihotang

Tema Lomba Penelitian pada tahun 2017 yaitu "Melalui Inovasi Kita Ciptakan Perkeretaapian Nasional yang Andal, Selamat, Efisien, dan Nyaman"

Dilaksanakan di 10 regional (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua) dengan tujuan untuk menampung dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan transportasi.

Nama-nama pemenang Lomba Penelitian kategori SLTA-S1 dan S2-S3 yaitu:

Kategori SLTA-S1:

- Reza Aulia Akbar "MAFTEC Detektor Kelelahan – Kantuk Masinis Terintegrasi Untuk Pencegahan Kecelakaan Kereta Api
- Juara II : Danang Desfri Abdillah "Commute Points"
- Juara III : Sugiarto "Perancangan Sistem Monitoring Getaran Gerbong Kereta Gerbong Arduino"

Kategori S2-S3:

- Juara I : Meyer E. Sihotang "Purwarupa Pintu Perlindungan Kereta Api Otomatis Untuk Mencegah Kecelakaan di Perlindungan Sebidang"
- Juara II : Kharisma Trinanda Putra "Sistem Informasi Terintegrasi Pada Kereta Api Berbasis IOT"
- Juara III : Achmad Muyidin Arif "Pemilihan Rute *High Speed Train* Jakarta – Surabaya Untuk Meningkatkan *Feasibility*"

TEMU KARYA PENELITI



Foto bersama Menteri Perhubungan dan Tim Penilai

Temu karya peneliti merupakan ajang untuk mengembangkan kreativitas para peneliti dan saling tukar menukar informasi serta sebagai forum peneliti untuk latihan mengembangkan potensi diri dan mempublikasikan karya ilmiahnya.

Makalah yang ditampilkan dalam Temu Karya pada tanggal 6 September 2017 yaitu:

- Pembuatan *Prototype* Alat Penghitungan *Track Access Charge (TAC)* Pada Prasarana Kereta Api Dengan Menggunakan Sensor Infra Merah;
- Integrasi Pelayanan Penumpang di Simpul Transportasi Merak;
- Optimalisasi Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Solo Melalui Peningkatan Konektivitas Antara Solo – Yogyakarta Dengan Angkutan Kereta Api Khusus Bandar Udara; dan
- Konsepsi Tol Laut dan Studi Kasus Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut.



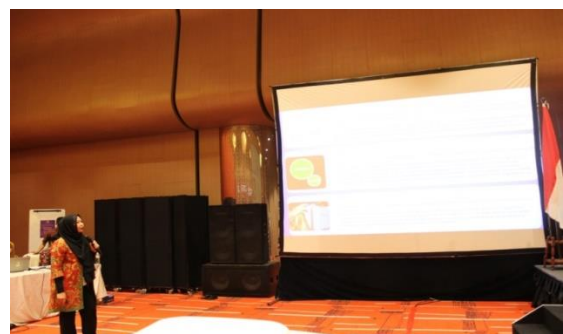
Pemaparan “Pembuatan *Prototype* Alat Penghitungan *Track Access Charge (TAC)* Pada Prasarana Kereta Api Dengan Menggunakan Sensor Infra Merah”



Pemaparan “Konsepsi Tol Laut dan Studi Kasus Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut”



Pemaparan “Integrasi Pelayanan Penumpang di Simpul Transportasi Merak”



Pemaparan “Optimalisasi Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Solo Melalui Peningkatan Konektivitas Antara Solo – Yogyakarta Dengan Angkutan Kereta Api Khusus Bandar Udara

RAKORNIS

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) merupakan kegiatan rutin Badan Litbang Perhubungan dalam rangka mewujudkan sinergitas antara Lembaga Riset, Regulator, Operator Transportasi serta koordinasi guna mendukung sinkronisasi kegiatan penelitian di bidang transportasi.

Acara dimaksud dihadiri pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Kementerian/ Lembaga, Dinas Perhubungan Provinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perguruan Tinggi, Dewan Pakar Transportasi, Asosiasi dan instansi lain yang terkait.



Butir Kesimpulan Rakornis:

- ✓ Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian, maka perlu ditunjang peningkatan kolaborasi/ kerja sama antara Badan Litbang Perhubungan dengan Perguruan Tinggi, Kementerian lain, Lembaga Riset, dan industri baik Swasta maupun BUMN serta Lembaga Profesional di bidang transportasi lainnya seperti MTI;

Rakornis diselenggarakan pada tanggal 17 s.d 18 Februari 2017 di Jakarta dibuka oleh Menteri Perhubungan dan dihadiri oleh 300 peserta dengan tema:

“Peningkatan Sinkronisasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi Dalam Mewujudkan Konektivitas Transportasi Nasional Yang Efektif dan Efisien”.

- ✓ Peran Badan Litbang Perhubungan diperkuat melalui pemberian pelayanan penelitian dengan merespon isu-isu strategis/ fundamental dan aktual baik internal (kebutuhan/ masukan sub sektor) maupun eksternal serta fokus pada permasalahan yang memerlukan penyelesaian segera;

- ✓ Badan Litbang agar lebih sensitif dan responsif terhadap perkembangan teknologi transportasi yang semakin cepat, namun tetap memperhatikan kemanfaatan, kesiapan, dan kesesuaian dengan kondisi di Indonesia;
- ✓ Perlunya menyusun rencana induk penelitian dan pengembangan transportasi dengan mengacu pada *roadmap/* rencana induk riset nasional yang disusun oleh Kemenristek Dikti. Dalam rencana induk disusun fokus/ tema penelitian agar bersinergi dengan sektor lainnya;
- ✓ Salah satu kajian mendasar yang diperlukan adalah penyusunan indikator pengembangan dan operasional transportasi, baik skala nasional maupun lokal, hal ini sebagai basis data dalam merencanakan dan mengembangkan sistem transportasi;



“Rakornis bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara Lembaga Riset, Regulator, Operator Transportasi serta koordinasi guna mendukung sinkronisasi kegiatan penelitian di bidang transportasi.”



Rapat Koordinasi Teknis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2017

Jakarta, 17-18 Februari 2017

- ✓ Dukungan penelitian terhadap BUMN transportasi terkait dengan peningkatan pelayanan, konektivitas, dan integrasi antarmoda (misalnya KA bandara, KA pelabuhan) sangat diperlukan;
- ✓ Sinergi antara lembaga riset termasuk Badan Litbang Perhubungan dengan industri perlu terus ditingkatkan agar hasil penelitian yang dihasilkan dapat dimanfaatkan/ diimplementasikan, demikian jugaantisipasi kebutuhan SDM dan perkembangan teknologi;
- ✓ Badan Litbang Perhubungan perlu menampilkan/ mempublikasikan produk-produk hasil penelitiannya agar diketahui/ dikenal oleh masyarakat dan *stakeholders*, antara lain dengan melaksanakan kolokium (pertemuan keahlian; seminar), dan lain-lain.



“Harapan saya melalui kegiatan Forum Komunikasi Kelitbangan ini dapat menjadi *moment* yang tepat untuk mensinergikan rencana riset antar Kementerian/ Lembaga dan Perguruan Tinggi dengan fokus pada bidang yang relevan dengan permasalahan transportasi saat ini. Harapan besar kami agar Badan Litbang Perhubungan lebih berperan memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Perhubungan baik melalui naskah akademis maupun teknis,” tutup Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam sambutannya.

FKK diselenggarakan pada tanggal 21 November 2017 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta Pusat dengan tema “Penguatan Kapasitas dan Peran Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Inovasi Pembangunan Infrastruktur Guna Peningkatan Daya Saing Perekonomian Nasional”



Butir Kesimpulan FKK:

- ✓ Infrastruktur nasional harus dibangun sebagai satu kesatuan dan keterpaduan, membangun terobosan dalam berinovasi, dengan berfikir *out of the box* sehingga seluruh sekat-sekat yang membatasi institusi untuk melakukan terobosan dihilangkan;
- ✓ Terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain melalui deregulasi dan kerangka hukum, penguatan kualitas SDM, skema pendanaan yang inovatif, kepemimpinan, dan didukung penerapan hasil-hasil riset dan teknologi;
- ✓ Penguatan institusi Balitbang sangat penting dilakukan, baik pada anggaran maupun *political will* pimpinan, karena Balitbang merupakan ujung tombak dalam inovasi;
- ✓ Platform penguatan inovasi meliputi *regulating*, *executing*, dan *empowering*;
- ✓ Secara kelembagaan, Badan Litbang Kementerian PUPR dapat dijadikan sebagai barometer keberhasilan peran lembaga penelitian dan pengembangan yang disertai kewenangan dan dukungan fasilitas, sarana prasarana, serta pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pembangunan infrastruktur yang hasil inovasinya dimanfaatkan untuk membantu kebijakan teknis bidang PUPR;
- ✓ Adapun Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan contoh transformasi lembaga penelitian dan pengembangan yang diberikan kewenangan dalam hal perumusan kebijakan Kementerian Keuangan yang akan ditetapkan, dimana setiap kebijakan yang dihasilkan Kementerian Keuangan didukung melalui hasil analisis BKF;
- ✓ Perlunya dilakukan penyusunan *roadmap* atau *action plan* kerja sama lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia yang melibatkan jalur koordinasi/ sinergitas antara dunia akademisi, pemerintah, dan bisnis

MONITORING ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2017



Peristiwa mudik lebaran perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah karena peristiwa mudik lebaran memerlukan pelayanan berupa jasa angkutan yang cukup besar (baik melalui darat, laut dan udara) beserta pendukungnya, yang apabila tidak ditanganⁱ dengan baik akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baik lokal maupun nasional.

Penanganan penyelenggaraan angkutan lebaran bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perhubungan dan jajarannya di daerah, tetapi juga lembaga-lembaga lain yang terkait baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan operasional maupun keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan angkutan lebaran akan sangat tergantung pada koordinasi, pembagian tugas dan komitmen untuk melaksanakannya dari masing-masing instansi terkait. Dasar pelaksanaan monitoring angkutan lebaran adalah sebagai berikut:

- a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu
- b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 522 Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438 H)
- c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 569 Tahun 2017 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438 H)
- d) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor: IM 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Pelaksanaan Monitoring dan Berakhirnya Masa Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438 H)
- e) Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor: SK 48 Tahun 2017 tentang Tim Analisa dan Evaluasi (ANEV) Petugas Posko Penyelenggaraan Angkutan Terpadu Tahun 2017 (1438 H)

Pemerintah RI melalui Kementerian Sekretariat Negara berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Ekonomi Kreatif menetapkan tema besar mudik nasional yaitu “Mudik Bareng Guyub Rukun”. Guyub memiliki arti *kebersamaan* sedangkan Rukun memiliki makna *keselarasan*. Tema ini dipilih karena mencerminkan nilai – nilai pancasila dalam masyarakat Indonesia.

Maksud dari kegiatan analisa dan evaluasi Angkutan Lebaran Tahun 2017 ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi permasalahan – permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan angkutan lebaran 2017 yaitu dari H-7 sampai dengan H+7 lebaran 2017.

Sedangkan tujuannya adalah tersusunnya rekomendasi dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran di masa yang akan datang.

MONITORING ANGKUTAN NATAL 2017 DAN TAHUN BARU 2018



Dalam rangka mengantisipasi masa liburan natal tahun 2017 dan tahun baru 2018 perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah karena diprediksikan akan terjadi lonjakan penumpang yang memerlukan pelayanan jasa angkutan yang cukup besar (baik melalui darat, laut dan udara) beserta pendukungnya. Penanganan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perhubungan dan jajarannya di daerah, tetapi juga lembaga-lembaga lain yang terkait baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan operasional maupun keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 akan sangat tergantung pada koordinasi, pembagian tugas dan komitmen untuk melaksanakannya dari masing-masing instansi terkait.

Dasar Pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru Tahun 2018 yaitu:

- a. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Monitoring Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018
- b. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 34 Tahun 2017 Tentang Monitoring Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018
- c. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 37 TAHUN 2017 Tentang Peningkatan Keselamatan Penyelenggaraan Transportasi dan Persiapan Pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018

- d. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 38 Tahun 2017 Tentang Persiapan Menghadapi Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 6474/AJ.201/DRJD/2017 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Mobil Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018
- f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.6411/KP.801/DRJD/2017 tentang Tim Monitoring Angkutan Natal dan Tahun Baru
- g. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/91/2/DJPL-17 Tentang Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2017 dan Tahun Baru 2018
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 Serta Pos Koordinasi (Posko) Penyelenggara Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut Natal 2017 dan Tahun Baru 2018
- i. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.801/SK.91/DJKA/12/17 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pembentukan Posko Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 Bidang Perkeretaapian.
- j. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor: SK 95 Tahun 2017 tentang Tim Analisa dan Evaluasi (ANEV) Petugas Posko Penyelenggaraan Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Maksud dari kegiatan analisa dan evaluasi Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru Tahun 2018 ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi permasalahan – permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru Tahun 2018 yaitu dari H-7 sampai dengan H+13 Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru Tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah tersusunnya rekomendasi dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru di masa yang akan datang.

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima pekerjaan adalah bagian dari proses pengadaan barang/ jasa, dimana proses tersebut dilaksanakan setelah selesainya waktu pelaksanaan pekerjaan. Serah terima pekerjaan didasari oleh Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Setelah menyelesaikan penelitian, maka tahap selanjutnya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melaksanakan serah terima pekerjaan dengan Pihak Pengusul Kajian dalam hal ini Penerima Manfaat terkait sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa. Serah terima tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan penyerahan studi baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy*.

Pada tahun 2017, Badan Litbang Perhubungan telah melaksanakan dan menghasilkan beberapa penelitian baik penelitian besar, sedang, maupun kecil. Proses selanjutnya adalah melakukan serah terima hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sekretariat Badan Litbang, Puslitbang Transportasi Antarmoda, Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, serta Puslitbang Transportasi Udara.

Beberapa dokumentasi serah terima hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan Litbang Perhubungan

Kegiatan serah terima bagian Sekretariat Badan Litbang Perhubungan diselenggarakan untuk kedua studi kebijakan transportasi pada tahun 2017 yang melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Boven Digoel.



Serah Terima Studi Tatralok Kabupaten Minahasa Selatan
Jakarta, 19 Desember 2017



Serah Terima Studi Tatralok Kabupaten Boven Digoel
Jakarta, 19 Januari 2018



2. Puslitbang Transportasi Antarmoda



Serah Terima Kajian Perorangan “Integrasi Pelabuhan Gilimanuk dengan Halte Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi” Kepada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang-Gilimanuk

3. Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian



Serah Terima Kajian Kebutuhan Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas di Kota Kendari

4. Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan



Serah Terima Penelitian Rencana Induk Pelabuhan (RIP) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

5. Puslitbang Transportasi Udara



Serah Terima Kajian Perorangan “Integrasi Serah Terima Kajian Implementasi Program Keamanan Penerbangan (AOSP) pada Maskapai Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Mentari Airlines, dan Citilink Indonesia yang Beroperasi di Bandar Udara Hang Nadim

BAB VI

PENUTUP



TINJAUAN UMUM

Laporan tahunan ini disusun sebagai salah satu bahan untuk evaluasi program kerja dan pelaksanaan kegiatan Badan Litbang Perhubungan selama satu tahun anggaran yang dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBN. Badan Litbang Perhubungan telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya, sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan baik sebagai kebijakan kementerian maupun kebijakan Badan Litbang Perhubungan dalam mendukung suksesnya penyelesaian tugas yang diemban oleh Menteri Perhubungan.

Terwujudnya penyelesaian tugas dan fungsi Badan Litbang Perhubungan semakin meningkatkan kesadaran seluruh jajaran Badan Litbang Perhubungan akan peran SDM dalam perwujudan pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang semakin penuh tantangan dan berat dalam menghadapi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi dengan isu global dan modernisasi yang sangat pesat.

Berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dan progres kegiatan tahun 2017 serta rencana kegiatan tahun 2018 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok serta pedoman untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pada tahun yang akan datang.

Harapan yang tak kunjung habis adalah agar program kerja dan progres tahun 2016 serta usulan kegiatan tahun 2017 Badan Litbang Perhubungan dapat terlaksana sesuai sasaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan kesiapan dari semua pihak yang terkait dalam bentuk kemauan semua pegawai dan pimpinan, kemampuan semua pihak dan tersedianya dukungan sumber daya yang dibutuhkan.

TINJAUAN KHUSUS

Peningkatan kualitas penyelesaian tugas pokok, penunjang dan khusus masih perlu terus ditingkatkan dengan mengakomodir masukan dan saran dari pihak terkait terutama dari lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk itu perlu adanya perhatian dan penanganan khusus di berbagai bidang antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Badan Litbang Perhubungan dengan mengarah kepada spesialisasi bidang keahlian atau kelompok kerja peneliti.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian bidang transportasi.
3. Peningkatan intensitas publikasi hasil-hasil penelitian baik cetak maupun *online*.
4. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait baik intern Kementerian Perhubungan, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian maupun Kementerian terkait serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peningkatan sarana dan prasarana penelitian.